

KEPENTINGAN NASIONAL CHINA DALAM KONFLIK
SURIAH



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa Makassar*

Oleh:

NUR FADLY

Stb. 45 10 023 027



**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2016

HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Enam Belas Skripsi dengan Judul “Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Suriah”

Nama : **Nur Fadly**
NIM : **45 10 023 027**
Jurusan : Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional



Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Pengawas umum :


Arief Wicaksono, S.ip.MA
Dekan fisip universita bosowa

Panitia ujian :


Arief Wicaksono, S.ip.MA
ketua


Fifi elvira basri, S.ip.MA
sekretaris

Tim Penguji :

1. Arief Wicaksono, S.ip.MA
2. Zulkhair Burhan, S.ip.MA
3. Finahliyah Hasan, S.ip.MA
4. Beche Bt. Mamma, S.ip.MA


.....

.....

.....

.....

ABSTRAKSI

Nur Fadly, 2016. "Kepentingan Nasional China dalam Konflik Suriah", di bawah bimbingan Bapak Arief Wicaksono. S.ip. M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Zulkhair Burhan. S.ip. MA. sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apa kepentingan China dalam konflik Suriah dan bagaimana kepentingan nasional tersebut dapat dimaksimalkan. Atas maksud tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan tentang peristiwa secara jelas dan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka melalui buku, jurnal, majalah, dan internet. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan penulis melalui studi pustaka pada berbagai literatur. Data tersebut kemudian dielaborasi dengan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa keterlibatan china dalam konflik suriah merupakan kepentingan dalam bidang ekonomi dalam hal ini kepentingan ekonomi China berusaha menjaga kerjasama ekonomi dan sebagai pemasok kebutuhan energy dari kawasan timur tengah yang merupakan kawasan strategis dalam mengekspor barang-barang dari cina untuk timur tengah, Eropa dan Afrika. Kemudian dalam hal kepentingan keamanan Cina berusaha untuk memastikan gerakan terorisme, esktrimisme, dan separatisme tidak menyebar ke Cina khususnya di wilayah Xinjiang yang membahayakan dan mengancam keamanan nasional China.

Upaya untuk merealisasikan kepentingan china dalam konflik suriah dengan cara mendukung pemerintahan bahsyar Al-Assad dengan cara penyelesaian konflik dengan cara politik.

Kata kunci : Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Suriah.



KATA PENGANTAR

Diada, lictiar, usaha, dan tual yang khal, dalam mengpaka bergerak dan bergerak sebagai salah satu bentuk manifestasi kenam-puan kita dan pengejawantahan akan segala sifat-sifatnya. Olehnya, kita tak ada kata yang paling representatif, kata yang pantas dan patut mengucapkan selamat mengucapkan dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah membentangkan jalan untuk hamba-Nya dan berkuasa menyukuti hamba kepada inuayah dan cahaya-Nya ke dunia, sehingga, Alhamdulillah, semua keinginan yang di cita-citakan dan di rencanakan kesemuanya ini dapat terealisasi sesuai dengan niat yang tulus.

Dalam pembuatan dan penyempurnaan Skripsi ini tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang kami alami, sehingga untuk itu kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, **Bapak Ruslan Patasi dan Hasmina** beserta adik semata wayang **Lia Fitri** yang telah memberikan cinta tulus, semangat, cinta dan kasih yang tidak pernah putus sampai detik ini. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dan terselesaikan sesuai dengan rencana kepada **Bapak Arif Wicaksono, S.p.i, MA.** Dan **Bapak Zulkhair Burhan, S.p.i, MA.** selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang penuh kesabaran dan ketulusan dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi mulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muh. Baker Ibrahim, M. Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Arief Wicaksono, S.H., M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Zulkhair Burhan, S.p., M.A. selaku ketua program studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Para dosen Program studi Ilmu Hubungan Internasional atas ilmu yang diberikan selama kami menuntut ilmu di bangku kanan Universitas Bosowa Makassar.
5. Keluarga besar dikampung halaman Desa Tolise-tubono, Kec. Banggai Utara, Kab. Banggai laut, Sulawesi tengah. Dan keluarga besar yang berada di kendari. Terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi kalian.
6. Teman-teman Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Montolutusan (HPPM-Montolutusan) yang tidak disebutkan satu persatu namanya. terima kasih atas kebersamaan dan ilmu yang telah diberikan.
7. Teman-teman SOMASI 010 universitas Bosowa Makassar Hardiyanto, Andi Rahmat, Imam Suwandi, Erwin Madao, Sudirman, S.sos, dan masih banyak lagi yang tak sempat ditulis namanya. Terima kasih banyak telah bersama melewati proses sebagai mahasiswa selama duduk di bangku perkuliahan.

Secara kodrat kami menyadari bahwa ilmu yang kami peroleh ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dan bermutu untuk perbaikan selanjutnya. Dengan senang hati sangat kami harapkan dengan kerendahan hati di him mendatar.

Harapan kami semoga skripsi yang kami tulis ini dapat menjadi pengantar refleksi serta dapat merubah paradigma berpikir kita di seantero dunia edukasi secara makro dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa hubungat internasional di lingkungan Universitas Bosowa Makassar demi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Sosial dan Politik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin

Makassar, Juli 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PENERIMAAN	3
ABSTRAKSI	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	8
F. Rancangan Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Neorealisme	11
B. Konsep Kepentingan Nasional	15
C. Politik Luar Negeri	17
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Suriah Dan Latar Belakang Konflik	22
A.1 Suriah	25
A.2 Latar Belakang Konflik Suriah	29

A.3 Kronologi Konflik Suriah	70
B. Hubungan China dan Amerika	74
C. Kebijakan Luar Negeri China dan Konflik Suriah	77

BAB IV KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERAN MENDALAM PERKOTAAN

A. Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Suriah	
A.1. Kepentingan Ekonomi China dan Amerika	81
A.2. Keamanan Energi China dan Amerika Tengah	82
A.3. Hubungan Ekonomi China dan Amerika Tengah	85
A.4. Kepentingan Keamanan Nasional China	87
B. Cara memaksimalkan Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Suriah	89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suriyah merupakan salah satu negara yang sampai sekarang masih terlibat dalam konflik internal antara pemerintahan dan masyarakatnya. Konflik yang terjadi di Suriyah merupakan salah satu kasus yang terjadi ditimur tengah, dimana masyarakatnya ingin merubah system yang diktator menjadi system yang demokrasi.

Berawal hanya dari grafiti di dinding sekolah di sebuah kota kecil di perbatasan Yordania bernama Deera, sebanyak 15 anak ditangkap dan ditahan pada 06 Maret 2011 atas karya grafiti mereka yang bertuliskan *As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam (Rakyat Ingin Menyingkirkan Rezim!)*.¹ 15 orang anak ini yang terdiri dari anak laki-laki berusia sekitar 10-15 tahun tidak hanya ditangkap dan ditahan melainkan juga disiksa. Hal ini memicu para demonstiran untuk turun ke jalan dan melakukan demonstrasi. Demonstrasi yang terjadi pada 15 Maret 2011 ternyata tidak hanya terjadi di Deera tetapi juga terjadi beberapa kota di Suriyah lainnya seperti Damaskus. Inilah awal terjadinya pemberontakan di Suriyah pada tanggal 16 Maret 2011 sebanyak 35 orang ditahan karena aksi protes di Damaskus dan sebagian besar para demonstiran di Deera ditembak oleh pasukan keamanan.

¹ Kuncahyono, Trias. *Musim Semi Suriyah: Anak-Anak Sekolah Penyulut Revolusi*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013). Hal 9

Krisis di suriah kini telah memanas, tahun ketujuh ataman pemberontakan, kelompok oposisi terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad, mereka (*pemberontak*) menamakan diri sebagai kelompok oposisi melakukan hal yang sama karena terinspirasi dengan keberhasilan Tunisia, Mesir dan Libya dalam menumbangkan rezim. Namun kenyataannya krisis yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya tidak sama dengan krisis yang terjadi di Suriah. Di luar pendapat tentang tirani kekuasaan negara-negara tersebut, kelompok oposisi sepertinya telah melakukan "kesalahan" menganggap rezim di Suriah sama dengan rezim yang terjadi di Tunisia, Mesir ataupun Libya. Perbedaan yang terjadi adalah "kekuatan" rezim itu terkait dukungan kekuatan dunia. Krisis yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya kelompok oposisi berhasil menggulingkan rezim karena didukung kekuatan NATO dan Liga Arab. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949. Dan Liga Arab adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara arab itu sendiri.

Sedangkan kekuatan besar lain seperti Rusia dan China mengambil posisi diam saja (tidak ikut campur). Namun untuk kondisi di Suriah ini jelas berbeda, meskipun keinginan kelompok oposisi untuk Presiden Bashar Al-Assad ini turun dari kekuasaan nampak didukung oleh NATO dan Liga Arab, kekuatan besar seperti Rusia dan China yang selama ini menjadi sekutu pemerintah Suriah nyata-nyata membentenginya, inilah yang membuat NATO tidak bias bekerja seperti yang telah terjadi sebelumnya di Tunisia, Mesir dan Libya, kekuatan

militer Suriah yang mendapat dukungan penuh dari China dan Rusia membuat NATO pun berpikir berulang kali untuk "menyembunyi" operasi.

Di sinilah awal mulanya perseteruan membesar menjadi perang saudara. Situasi menjadi semakin kacau ketika dunia internasional menyorotinya. Tim pemantau PBB yang dipimpin Kofi Annan pun tidak mampu bekerja maksimal untuk mengurai permasalahan di sana. Semakin memanas ketika mayoritas anggota dewan keamanan PBB seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat menghendaki resolusi yang berfokus pada pemberian sanksi ke Suriah.

Disisi lain, Rusia dan China menolok resolusi yang yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menggunakan hak veto oleh kedua negara tersebut yang akan menindas rezim Presiden Bashar Al-Assad.² hak veto merupakan hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. China sendiri menentang intervensi militer di Suriah dan menentang perubahan rezim dengan cara kekerasan.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas maka kami membatasi hasil pembahasan mengenai kepentingan nasional China dalam konflik suriah tentang kepentingan nasional China pada tahun 2011-2015.

² Suryo, C. Hardiprodjo. "Serba salah tentang Suriah" dalam http://www.kompasiana.com/serba-salah-tentang-suriah_551271bca333116459ba7d63. Diakses 29 Februari 2016.

³ Liputan6. "China dan Rusia Beri Dukungan untuk Suriah" dalam <http://news.liputan6.com/cina-dan-rusia-beri-dukungan-untuk-suriah>. diakses 7 Februari 2016.

2. Rumusan Masalah

Dengan melihat batas dan rumusan masalah diatas, dengan demikian penulis merumuskan untuk merevisi tujuan dan tujuan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu:

1. Apa kepentingan nasional China dalam konflik suriah?
2. Bagaimana memaksimalkan kepentingan nasional China dalam konflik Suriah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan kepentingan nasional China dalam Konflik Suriah.
- b. Mengetahui kepentingan nasional China itu dimaksimalkan

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam kajian kepentingan nasional (*National Interest*) dan politik luar negeri.
- b. Mengetahui Kepentingan Nasional China dalam Konflik Suriah.
- c. Salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

D. Kerangka Konseptual

Kedamaian dan ketentraman adalah hal yang penting untuk kemajuan sebuah negara. Gejolak dan perang akan menimbulkan instabilitas serta

menghambat bahkan menghentikan kemajuan dan pembangunan diberbagai bidang. Kekuatan imperialis memahami baik hal ini, dan selalu berusaha menciptakan gejolak antar negara dan menciptakan separah mungkin instabilitas bahkan perang antar negara.

Pada dasarnya konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam tatanan hubungan internasional. Perebutan wilayah, sengketa perbatasan, pertentangan ideology dan agama merupakan aspek yang biasa disebut di antara sekian banyak aspek lain yang dapat membuat potensi suatu konflik terjadi. Dalam study hubungan internasional terdapat teori Neorealisme yang mengemukakan tentang konsep Hierarki dan Anarki dalam hubungan internasional itu sendiri.

Kenneth Waltz memaparkan bahwa terdapat dua system dalam struktur politik, yakni system hierarki dan system anarki Sistem hierarki (atau juga dikenal dengan istilah system domestic) bersifat tersentralisasi. Maksudnya adalah ada bagian-bagian yang *super-ordination* dan ada yang termasuk dalam *sub-ordination*, ada yang 'memerintah' dan ada yang 'diperintah'. Sementara system anarki (atau juga dikenal dengan istilah system politik internasional) tidak tersentralisasi, dimana setiap bagian itu sama; tidak ada yang 'memerintah' dan tidak ada yang 'diperintah'.⁴

Persoalan kasus yang terjadi di Suriah tidak lepas dari kerumitan yang melatar belakangi konflik tersebut. Motif ini berupa perbedaan ideology, agama, etnik ataupun alasan strategis negara-negara lain yang mempunyai kepentingan

⁴ Kenneth N. Waltz, *Theory of international Politics* (Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc, 1979), hal. 88-102

nasional masing-masing Negara. Misalnya, Amerika Serikat dan kelompok oposisi di Suriah atau China, Rusia dan kelompok pemertanian.

Kepentingan Nasional ini digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam Politik Internasional. Konsep kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.⁵

Disisi lain, Hans J. Morgenthau, didalam "The Concept of Interest defined in Terms of power". Konsep Kepentingan Nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional.⁶

kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep "power" kepentingan "interest"

⁵ Jack C. Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, terj. Wawan Juanda, Third Edition, Clive Press Ltd, England, 1982, hal. 7

⁶ Aleksius Jemadu, *Politik Global Dalam Teori dan Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal. 67

didefinisikan ke dalam terminologi *power*.⁷ Sementara Banyu perwita dan M. Yani mengatakan bahwa kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.⁸

Bagaimanapun juga kepentingan nasional merupakan bagian yang bertujuan untuk menentukan kebijakan luar negeri oleh negara yang mempunyai kepentingan dalam konflik.

Jack C. Plano dan Roy Olfon mengungkapkan

“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional”.⁹

Dalam buku yang ditulis Miriam Budiarjo, terdapat definisi politik luar negeri sebagai “Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”.¹⁰ Berarti bahwa politik luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya.

Politik Luar Negeri didefinisikan sebagai pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara ketika memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan

⁷ Antonius sitepu, Teori Realisme Politik Hans. J. Morgenthau Dalam studi Politik dan HI, hal. 56

⁸ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. yani, Pengantar Ilmu HI, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, Hal. 35

⁹ *Ibid.* hal. 56

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1995, hal 12.

dengan negara-negara lain.¹² Jika kita membahas tentang politik luar negeri maka politik luar negeri saling berkaitan dengan namanya kepentingan nasional (National Interest) itu sendiri dan tidak lepas dengan adanya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang kemudian dapat didefinisikan oleh Diamond bahwasanya dia mengatakan tentang isi politik dari kebijakan luar negeri secara analitik adalah bagaimana suatu negara mengkombinasikan sarana untuk mencapai tujuan dan kepentingan kebijakan luar negerinya.¹³

Sedangkan Tulus dalam bukunya "Teori-teori Politik luar negeri" menyimpulkan bahwa: "Politik luar negeri adalah segala macam upaya kepentingan nasional yang melibatkan Bangsa lain ataupun Organisasi di luar ruang lingkup konsep system Negara Bangsa".¹⁴ Kebijakan politik luar negeri yang dijelaskan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan tujuan penelitian adalah tipe deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menggambarkan secara jelas tentang kepentingan nasional dibalik

¹² Yanua Ikbar. *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. PT. Re-Reka Aditama. Bandung 2014. Hal 209

¹³ Tulus Warsito. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta. Bigrat Publishing, 1998. Hal. 34

¹⁴ Mochtar Mas'oe'd. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES, 1990, hal. 184

keterlibatan China dalam Konflik Suriah

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana penelitian kuantitatif pada umumnya yang membutuhkan beberapa sumber, maka teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni Studi Pustaka (*Library Research*), dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan mengenai Kepentingan Nasional dalam konflik Suriah dan cara bagaimana kepentingan tersebut dimaksimalkan, baik melalui buku, artikel, surat kabar, maupun internet.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, internet, data olahan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang diterbitkan lembaga terkait dan sumber-sumber lain yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan teknik analisis kualitatif. Teknik ini didukung oleh keberadaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, sehingga hasil analisa tersebut memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dan analisis data penelitian ini akan di susun dalam karya tulis ilmiah dengan rancangan sistematika berikut:

- Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah,

batasan dan rumusan masalah, ajukan dan gunakan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- Bab kedua yaitu tinjauan pustaka berisi penerasan kepustakaan dan literature tentang kepentingan nasional china dalam konflik suriah serta pembahasan konsep neorealisme, kepentingan nasional dan politik luar negeri.
- Bab ketiga yaitu gambaran umum objek penelitian, berisi pemaparan tentang Suriah dan konflik Suriah.
- Bab keempat, analisis pembahasan yaitu hasil penelitian dan pembahasannya. Berisi pemaparan tentang kepentingan nasional China dan Upaya memaksimalkan kepentingan nasional China dalam konflik Suriah.
- Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Neorealisme (anarki dalam hubungan internasional)

Neorealisme muncul pada tahun 1970-an, sebagian sebagai respon atas tantangan yang dikemukakan oleh teori independensi dan sebagian lain sebagai koreksi terhadap pengabaian realisme tradisional terhadap kekuatan ekonomi.

Dalam wilayah hubungan internasional yang lebih tradisional, Kenneth Waltz berusaha memasukan apa yang ia pandang sebagai disiplin saintifik dan metodologis seperti antropologi dan ekonomi ke dalam studi politik internasional. Neo realisme atau realisme struktural bagian dari kritik terhadap realisme tradisional.

Dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics*, Kenneth Waltz memaparkan bahwa terdapat system hierarki dan anarki. System hierarki bersifat tersentralisasi, maksudnya adalah ada bagian-bagian yang super ordination dan ada yang termasuk dalam sub ordination, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Sementara system anarki atau system politik internasional tidak tersentralisasi, dimana setiap bagian itu sama tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah.

Menurut Waltz, ketika negara-negara berada dalam system yang anarki maka negara-negara tersebut harus siap menghadapi segala situasi, karena nature dari negara adalah negara yang berperang (*The nature of the state is a state of*

war. Ini bukan berarti bahwa perang tidak terjadi tetapi ketika suatu negara menggunakan force atau tidak, perang sudah-waktu akan terjadi.¹⁵

Dalam teori neorealisme ada yang disebut sebagai prinsip self-help, self-help adalah prinsip paling penting dalam system anarki, dengan adanya self-help dalam system anarki maka setiap negara yang ada akan berusaha untuk berbuat sesuatu yang berkaitan dengan proteksi negaranya. Dalam self-help juga akan terlihat sampai sejauh mana sebuah negara dapat bertahan dalam system tersebut, ketika negara mampu bertahan dengan situasi anarki yang ada, ini akan berpengaruh pada perilaku negara. Selain itu, elemen lain dalam system anarki adalah power dan proses struggling. Negara-negara dalam system anarki bertindak demi kepentingan mereka dan tak jarang menggunakan perang untuk mendapatkan kepentingnya.¹⁶

Waltz juga mengungkapkan bahwa hal yang dapat membuat system anarki stabil adalah *Balance of Power*. Balance of power adalah kondisi untuk mempertahankan stabilitas system yang ada (dalam hal ini adalah system yang anarki) tanpa harus merusak keberagaman elemen (negara) dalam system itu sendiri. Balance of power juga dapat terjadi dikarenakan system itu adalah system yang anarki dan negara-negara dalam system tersebut ingin bertahan. Dengan

¹⁵ Kenneth N. Waltz, *theory of international Politics* (Philippines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1979, Hal. 88

¹⁶*Ibid.* hal. 112

demikian, negara-negara dalam system anarki akan berusaha bertahan dalam system ini demi terciptanya kondisi balance of power.¹⁷

Alexander Wendt mengungkapkan tentang konsep anarki dalam hubungan internasional bahwasanya:

“Anarki adalah segala hal yang dilakukan oleh negara, artinya, anarki tidak inheren di dalam system internasional, melainkan hanya ciptaan negara di dalam system itu sendiri”.¹⁸

Ada dua jenis sarana bagi negara untuk mencapai kondisi balance of power yaitu:

1. internal balancing antara lain meningkatkan kapabilitas ekonomi, kekuatan militer atau mengembangkan sejumlah strategi.
2. External balancing antara lain memperkuat dan memperbesar aliansi atau melemahkan lawan.

Adanya balance of power membuat ekspektasi bahwa perilaku negara akan disesuaikan dengan balance of power. ketika diperhadapkan pada ancaman-ancaman yang datang dari luar, maka negara dapat memilih untuk melakukan balancing. Balancing adalah situasi dimana negara-negara dalam system akan berusaha untuk membentuk koalisi demi menghadapi ancaman tersebut.¹⁹ Dengan demikian semua negara yang ikut campu

¹⁷ Scott Burchill-Andrew Linklater, *Teori-teori Hubungan Internasional*. Nusa Media, Bandung.2015. Hal.112

¹⁸ Alexander Wendt, “Anarchy is what States make of it: the Social Construction of Power Politics”, *International Organization* 46, no.2 (Spring 1992): 391-425.

¹⁹ Scott Burchill-Andrew Linklater, *Op.cit.* Hal. 126

dalam konflik surut, memperhatikan kepentingan-kepentingan masing-masing negara untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara yang mempunyai kepentingan terhadap negara yang sedang dalam tatanan konsep Anarki.

B. Konsep Tentang Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu elemen penting dalam setiap usaha untuk memahami perilaku sebuah negara terhadap negara lain dalam pergaulan masyarakat internasional, baik sebagai policies maupun action, senantiasa mengandung unsur kesinambungan dan perubahan yang saling berinteraksi dengan masyarakat internasional lainnya.

Kaum realis memandang kepentingan nasional sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep power. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kepentingan nasional adalah mengejar kekuasaan, yakni apa saja yang bias membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian dalam konsep kepentingan nasional ini diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama.²⁰ oleh karena itu, seperti halnya yang diungkapkan oleh Banyu Perwita dan M. Yani, kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.²¹

²⁰ Mochtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES, 1990, hal 140.

²¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, Pengantar Ilmu HI, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, Hal. 35

Setiap negara dituntut untuk mempertahankan bdaan serta melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya seperti dalam konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau, dalam Mas'ood mengungkapkan pandangannya terhadap kepentingan nasional bahwa kemampuan minimum negara-negara adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-negara lain. Diartikan dalam pengertian yang lebih spesifik, bahwasanya negara atau bangsa harus bias mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisik), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas politik) entah itu demokratis, sosialis atau komunis dan sebagainya, serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistic dan sejarahnya (identitas kultur).²²

Tidak bisa dinafikan bahwasanya setiap negara mempunyai kepentingan nasional, karena itu setiap negara tidak bisa menghindari dari kepentingan nasional karena setiap negara mempunyai tujuan-tujuan nasional. Plano dan olton mengungkapkan:

"kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan factor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negrinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi".²³

²² Mas'ood, *Op.cit.* hal. 141

²³ Banyu perwita, *Op.cit.* hal. 35

Kepentingan nasional juga merupakan dasar pembuat kebijakan luar negeri suatu negara dalam berunding dengan negara lain dalam dunia internasional, dimana sedapat mungkin kepentingan nasionalnya ini tidak dirugikan oleh negara lain, melainkan memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut. Karena itu dalam perumusan politik luar negeri suatu negara melandaskan pada kepentingan nasional atau tujuan nasional yang hendak dicapainya. Hanya saja dalam perumusan kepentingan nasional yang hendak dituangkan kedalam politik luar negeri harus didukung oleh factor-factor yang saling berhubungan satu sama lain, seperti misalnya kebijakan luar negeri dalam bidang politik harus didukung pula oleh factor ekonomi, pertahanan dan keamanan suatu negara.

Robinson dalam Fachri Firman mengklasifikasikan kepentingan nasional dalam 6 kategori yaitu:

1. Primary interest, yaitu kepentingan yang meliputi perlindungan atas wilayah negara, identitas politik, kebudayaan serta kelanjutan hidup bangsa terhadap gangguan yang berasal dari luar.
2. Secondary Interest, yaitu kepentingan yang berada di luar kepentingan primer, tetapi cukup memberi kontribusi pada kepentingan itu, misalnya melindungi warga negara diluar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatic atas para diplomat di luar negeri.
3. Permanent Interest, yaitu kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting sebagai kepentingan nasional pada saat tertentu.

biasanya lahir dari pernyataan-pernyataan perorangan, kelompok dan lain-lain.

4. *Variable Interest*, yaitu kepentingan yang sifatnya senantiasa berubah, muncul juga dari pernyataan-pernyataan perorangan, kelompok dan lain-lain.
5. *General Interest*, yaitu kepentingan yang bersifat umum, dapat diberlakukan untuk banyak negara dan untuk wilayah geografis yang luas atau untuk beberapa bidang khusus, seperti perdagangan, investasi dan lain-lain.
6. *Spesific Interest*, yaitu kepentingan khusus yang tidak termasuk dalam kepentingan umum, namun biasanya ditentukan dari sana, lebih berkaitan dengan satu daerah atau saat tertentu.²⁴

Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dipertahankan oleh suatu negara dan disesuaikan dengan lingkungan regional maupun globalnya. Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan merupakan hal yang mendasar, dimana lingkungan dapat mempengaruhi kepentingan nasional maupun kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini dikarenakan kebijakan luar negeri merupakan refleksi dari keadaan dan perkembangan lingkungan internasional suatu negara atau bangsa dalam lingkungan domestic.

²⁴ Fachri Firman, analisis pengaruh reactor nuklir Iran terhadap Politik luar negeri Amerika Serikat, 2006. Hal. 16

C. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri sebuah negara merupakan sarana yang dibutuhkan dalam upaya mengejar kepentingan tertentu. Politik luar negeri bisa dikatakan sebagai instrument yang dipakai oleh suatu negara dalam upaya pencapaian kepentingan negara. Jika merujuk pada konsep kepentingan nasional maka politik luar negeri itu sendiri merupakan implementasi dari rumusan-rumusan kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Politik luar negeri memuat serangkaian sikap dan tindakan suatu negara terhadap negara lain.

Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi kongkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah kebijakan atau mempertahankan kebijakan kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.²⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka politik luar negeri mutlak diperlukan dalam percaturan politik internasional. Menurut Banyu Perwita dan M. Yani:

"Secara umum, politik luar negeri (foreign Policy) merupakan seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk

²⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional Abardin, Bandung, 1999, Hal. 11

mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional".²⁶

Dengan demikian, memahami politik luar negeri bukan merupakan suatu hal yang mudah, hal ini mengingat kompleksitas masalah serta variable yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri, termasuk di dalamnya, lingkungan internal serta lingkungan eksternal.

James N. Ronsenau mengungkapkan bahwasanya dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu system, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestic sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam situasi eksternal maupun internal dengan pertimbangan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.²⁷

Sementara dalam pandangan K.J. Holsti, mengungkapkan bahwasanya kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.²⁸

Dari uraian diatas, maka politik luar negeri secara umum selalu dipengaruhi oleh determinan domestic dan determinan eksternal, dalam hal ini

²⁶ Banyu Perwita, *Op.cit.* Hal. 47

²⁷ *Ibid.* Hal. 49

²⁸ K.J. Holsti, *Politik Internasional: suatu kerangka analisis*, Bina Cipta: Bandung. 1992. Hal. 21

lingkungan internasional. Kedua hal ini merupakan peran sebagai masukan bagi para pembuat keputusan politik luar negeri dalam penyusunan kebijakan luar negrinya. Hal ini tentunya dengan tetap harus mempertimbangkan pelbagai aspek lain seperti kapabilitas nasional yang dimiliki sehingga tujuan politik luar negeri itu sendiri bias dicapai.

James N. Ronsenau dalam Banyu Perwata dan M. Nani mengungkapkan bahwa kebijakn luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya yaitu:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi, merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang spesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang dan tantangan dari luar negeri. Dalam kenyataanya, rencana tindakan ini merupakan penerjemahan dari orientasi umum dan reaksi terhadap keadaan yang

konkret. Pada fase ini rencana tindakan politik luar negeri akan memberikan pedoman bagi:

- Tindakan yang ditujukan pada situasi yang berlangsung lama.
- Tindakan yang ditujukan pada negara-negara tertentu.
- Tindakan yang ditujukan pada berbagai sasaran lainnya.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi. Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata diambil para pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternal. Langkah-langkah tersebut dilakukan berdasarkan orientasi umum yang dianut serta dikembangkan berdasarkan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik.²⁹

Dari keseluruhan konsep diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh determinan eksternal yaitu lingkungan internasional itu sendiri atau masyarakat internasional.

²⁹ Banyu Perwita. *Op.cit.* Hal. 53

BAB II.

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Suriah Dan Latar Belakang Konflik

A.1. Suriah

Suriah pada awalnya merupakan bagian dari negara Republik Arab.¹⁰ Republik Arab suriah atau dikenal sebagai Suriah adalah negara yang terletak di timur tengah dengan luas wilayah daratan 185.180 km² dan perairan sekitar 0.84 %. Negara suriah berbatasan dengan Negara Turki disebelah utara, Irak di sebelah timur, laut tengah disebelah barat dan Yordania di selatan. Ibu kota Suriah adalah Damaskus. Lagu kebangsaan dari Suriah itu sendiri adalah Humāt au-Diyār, sementara moto dari Suriah itu sendiri adalah Persatuan, kebebasan dan sosialisme. System pemerintahan yang di anut oleh Suriah yaitu system pemerintahan semi Presidensial

Suriah merupakan istilah geografis untuk seluruh daerah meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina dan Israel sekarang yang dahulu dikenal dengan nama wilayah *Syam*. Suriahpun pernah menjadi wilayah kekuasaan berbagai bangsa, mulai dari berada dibawah kekuasaan bangsa Fenisia sebagai nenek moyang mereka, lalu dibawah kekuasaan bangsa Mesir pada tahun 1600 SM, bangsa Aramea pada 1200 SM yang pada saat itu menamai wilayah kekuasaannya "Suriah" berasal dari kata *Syriac* dialek Aramea serta mendirikan kota Damaskus sebagai pusat kegiatan dan tempat tinggal masyarakatnya. Abad ke-6 SM, Suriah

¹⁰ Raisa Rachmania. *Konflik Suriah Pada Saat Arab Spring 2010*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015. Hal. 39

menjadi bagian kekuasaan kekaisaran Persia. Selanjutnya pada abad ke-4 SM, Suriah menjadi bagian kekuasaan Imperator Iskandar yang Agung yang berhasil menghancurkan kekuatan Persia dan membuka jalan bagi penaklukan Suriah dibawah Imperium Romawi. Terpecahnya Imperium Romawi pada abad ke-4 sesudah Masehi menjadikan Suriah berada dibawah kekuasaan Imperium Bizantium yang berpusat di Konstantinopel.

Pada tahun 634-634 M. kaum Muslim Arab berhasil menaklukan Suriah dan memberikan ciri peninggalan yang begitu kuat hingga saat ini yaitu bahasa Arab dan agama Islam. Tahun 661 M. Suriah menjadi pusat berkembangnya Islam karena Damaskus menjadi ibukota kekuasaan Bani Umayyah. Selanjutnya tahun 1516, Suriah ditaklukkan oleh Imperium Turki Ustmani yang pada saat itu dalam perjalanan menyerang Mesir.

Akhir abad ke-18, banyak daerah-daerah di Suriah dikuasai oleh para *pasha* (panglima perang) setempat. Kemunduran Imperium Turki memberikan peluang bagi masuknya kekuasaan Eropa di Suriah.

Kekalahan Turki dalam perang dunia I, menyebabkan Turki harus menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya berada dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Prancis mendapatkan hak atas *Levant* (istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon) dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan Konferensi San Remo yang Akta mandatnya ditanda tangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas *Levant* sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya perang salib. Pada saat itu Prancis menerima Kapitulasi Sultan mengenai izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Hubungan baik tersebut dilanjutkan oleh Henri IV.

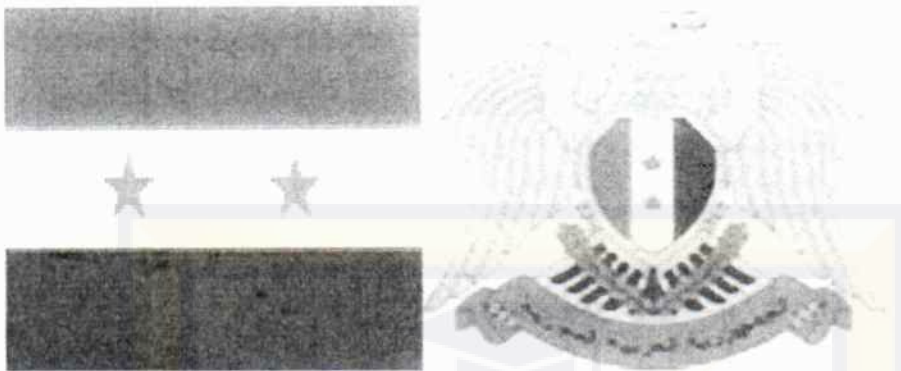
Richelieu dan Louis XIV. Pada 17-18 Prancis memberantai kapitulasi dengan tambahan reverensi khusus atas Levant mengenai tempat-tempat suci di Palestina dan hak istimewa Prancis tersebut disahkan melalui perjanjian pribadi Napoleon dengan Sultan yang berkuasa atas wilayah Suriah pada 1802. Kondisi tersebut selanjutnya mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit. (Gencer, 1993:198)

Tumbuhnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Prancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya di Levant, selain itu masyarakat Suriah pada saat itu lebih setuju berada dibawah mandat Inggris atau Amerika dari pada Prancis. Melihat kondisi tersebut, Prancis selanjutnya menyerang Damaskus dan mengusir Emir Faisal sebagai pemimpin tentara padang pasir yang nasionalis yang memiliki kekuasaan atas daerah pedalaman Suriah pada saat itu.

Setelah berhasil menguasai Suriah secara utuh, Prancis mulai melaksanakan politik *divide et impera* dengan memecah belah wilayah Suriah menjadi empat bagian yaitu Lebanon Raya, negara Damaskus meliputi Jabal Druze, Aleppo termasuk sanjaq Alexandretta dan wilayah Lattakia atau wilayah Alawi. Pengawasan atas Levant sendiri dilakukan oleh Komisaris Tinggi Prancis.

Pada 28 September 1941, Jenderal Catroux memproklamasikan kemerdekaan Suriah, yang isi naskahnya adalah:

1. Suriah berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat.
2. Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya.
3. Suriah berhak menyusun angkatan perangnya.
4. Suriah bersedia membantu Prancis selama perang.
5. Segala syarat terdahulu dengan perjanjian Prancis-Suriah yang baru yang menjamin kemerdekaan Suriah.



Gambar 1. Bendera dan lambang Negara Suriah.



Gambar 2. Peta Suriah

A.2. Latar Belakang Konflik Suriah

Gelombang protes yang dilakukan oleh rakyat sipil di kawasan Timur Tengah dan Afrika awal tahun 2011 lalu benar-benar mengejutkan karena sifatnya yang masif dan serentak. Rakyat tampak tidak lagi takut terhadap tindakan represif aparat keamanan dari rezim-rezim yang pada umumnya otoritarian, korup, dan telah berkuasa sangat lama. Walaupun sesungguhnya protes dan demonstrasi

yang dilakukan oleh rakyat sipil sudah sering kali terjadi sejak beberapa dekade sebelumnya tetapi aksi tersebut tidak pernah sedahsyat kali ini bahkan sampai berhasil mengubah tatanan yang ada dan berhasil menumbangkan rezim.

Demonstrasi yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2011 silam awalnya hanya menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi kehidupan masyarakat yang bertambah sulit serta tuntutan untuk meningkatkan perhatian kepada rakyat kecil. Namun lambat laun para demonstran menuntut reformasi yang lebih luas, baik reformasi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Presiden Bashar al-Assad kemudian berupaya untuk bersikap responsif terhadap tuntutan rakyat dengan cara melakukan beberapa langkah reformasi, seperti mengatur amandemen atas UU Keperwakilan dan UU Media Massa, pembentukan komite untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, evaluasi kinerja pemerintah, upaya penciptaan lapangan-lapangan kerja baru, pemberian asuransi kesehatan bagi karyawan, kenaikan gaji PNS melalui Dekrit Presiden No. 40 Tahun 2011, serta pemberian status kewarganegaraan bagi ribuan kaum Kurdi pada tanggal 7 April 2011. Secara resmi pula sebenarnya Presiden Bashar al-Assad memerintahkan aparat keamanan agar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para demonstran. Tetapi kenyataannya, di lapangan justru terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Hal ini terpaksa dilakukan karena ternyata banyak bukti yang

³¹ A. M. Fachrir. —Gerakan Rakyat: Untuk Perubahan: Pembelajaran dari Timur Tengah dalam Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Jakarta, Kementerian Luar Negeri, 2011, hal. 1.

tersiar bahwa kelompok-kelompok tersebut telah membombengi aksi-aksi demonstran, sehingga kekerasan di antara mereka pun tidak dapat dihindari.³²

A.3. Kronologi Konflik Suriah

Untuk lebih mengenai peta konflik di Suriah, perlu menelaah kronologi dan menyimak rentetan peristiwa demi peristiwa yang telah terjadi, yaitu:

Januari 2011: rakyat Suriah diserai via Facebook dan Twitter untuk turun ke jalan. Ada aksi demo yang terjadi tapi sangat tidak signifikan dan tidak pernah mencapai eskalasi sebagaimana yang terjadi di Mesir dan Tunisia.

15 Maret 2011: terjadi aksi demo di Daraa, sebuah kota kecil di perbatasan Jordan-Suriah. Sebulan sebelumnya, sekelompok pelajar menuliskan sloganslogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Polisi kota segera memenjarakan mereka selama sebulan dan saat dilepas, didapati bahwa mereka telah mengalami penyiksaan di dalam penjara. Massa yang marah segera berdemo pada tanggal 15 Maret 2011 memprotes gubernur Daraa.³³

Dalam aksi demo ini jatuh banyak korban, baik dari pihak sipil maupun militer. Media massa internasional dengan segera melaporkan berita menyebut bahwa aksi demo di Daraa dihadapi dengan sangat brutal oleh rezim Assad. Sejak saat itulah stigma bahwa rezim Assad bersikap brutal terhadap para demonstran

³² Jeremy M. Sharp and Christopher M. Blanchard are Specialists in Middle Eastern Affairs, —Armed Conflict in Syria: Background and U.S. Response!, loc cit hal. 5

³³ Dina Y. Sulaeman, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, Depok, Pustaka IIMaN, 2013, hal. 100.

tersebar luas ke seluruh dunia. Memang benar telah terjadi tindakan kekerasan saat itu, namun masih ada beberapa fakta yang tidak disebarluaskan oleh media-media mainstream saat meliput peristiwa di Daraa bahwa korban tidak hanya berjatuhan dari pihak sipil namun juga dari pihak polisi. Selama ini, berita yang disiarkan hanya menyebut bahwa polisi Suriah telah menembaki para demonstran tanpa belas kasihan sehingga menimbulkan korban jiwa minimalnya 15 orang.³⁴ Padahal, kenyataan bahwa terdapat tujuh polisi yang tewas juga sangat penting karena mengindikasikan bahwa para demonstran juga bersenjata. Info mengenai adanya polisi yang tewas hanya datang dari kantor berita pemerintah, Lebanonese News, dan Israel National News Report (INNR). Kemudian, untuk peristiwa di Daraa, INNR memberi judul berita, "*Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests*".³⁵

Selain itu, fakta penting lainnya yang tidak banyak diliput adalah Presiden Assad segera mengirim utusannya ke Daraa, meminta maaf kepada masyarakat atas kesalahan yang mungkin dilakukan oleh polisi dalam menangani demonstrasi. Di samping itu, utusan Presiden Assad, Bouthania Shabaan, juga berusaha meyakinkan masyarakat Daraa bahwa dia mendengar sendiri instruksi presiden kepada polisi, yaitu dilarang menembaki massa bahkan seandainya ada polisi yang tewas di tangan massa. Presiden Assad juga menjanjikan akan melakukan reformasi, yaitu memberikan kebebasan yang lebih besar kepada media massa, mengakhiri sistem satu partai di Suriah, dan mengakhiri Hukum Negara Darurat

³⁴ Dina Y. Sulaeman, op cit., hal. 102.

³⁵ <http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/143026#.UuTFaxCwphF> diakses pada 9 Maret 2016

para demonstran 'damai' namun sesungguhnya instruksi resmi Presiden Assad adalah larangan menembak jika dikhawatirkan ada warga sipil yang tewas.⁴¹ Tetapi, jika melihat situasi di mana banyak pemberontak yang bersenjata kemudian melakukan aksi teroris, tentu saja wajar apabila instruksi presiden berubah sesuai dengan siapa yang dilawan, dalam hal ini para teroris. Hal ini dikarenakan aksi-aksi teroris semacam itu justru hanya akan semakin memperparah situasi Suriah dan semakin membuat ketidakstabilan dalam masyarakat yang dibuat ketakutan.

13 Agustus 2011: Pemerintah Kanada menjatuhkan sanksi kepada semua anggota Pemerintah Suriah dan koleganya dengan cara travel banned dan pembekuan semua aset mereka di Kanada. Di hari yang sama, Amerika Serikat juga menyerukan embargo ekonomi kepada semua negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Suriah.

10 Agustus 2011: Presiden Barrack Obama menyerukan agar Presiden Bashar Al-Assad untuk mengundurkan diri yang diikuti dengan pembekuan semua aset Suriah di Amerika Serikat.⁴²

23 Agustus 2011: para aktivis oposisi, yang sebagian besar tinggal di luar Suriah, membentuk Syrian National Council (SNC) dengan pendukung utama Perancis dan Turki. Pembentukan SNC dilakukan di Istanbul, Turki. SNC mengklaim diri sebagai wakil kelompok oposisi dan beranggotakan

⁴¹ Dina Y. Sulaeman, *Op.cit.* hal. 108.

⁴² Amdya Mashfufah Hisyam, *Op.cit.* hal. 61.

sekitar 115 orang, sebagian besar aktivis diwanu Muslimin, tokoh oposisi Kurdistan, tokoh-tokoh seperti:

Pada awalnya, SNC menyerukan adanya intervensi militer PBB. Namun, karena resolusi DK PBB selalu diveto China dan Rusia, skenario untuk mengundang tentara asing seperti di Libya pun gagal. Kemudian, SNC beraliansi dengan FSA. Negara-negara yang turut aktif memberikan bantuan dana dan senjata adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Turki, Qatar, dan Arab Saudi.⁴³

25 September 2011: Presiden Perancis, Francois Hollande, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap oposisi Suriah di depan Sidang Umum PBB. —Tanpa ditunda-tunda lagi, saya serukan kepada PBB untuk menyediakan semua dukungan yang diminta rakyat Suriah kepada kita dan untuk melindungi liberated zone, kata Hollande.⁴⁴

Liberated zone yang dimaksud di sini adalah daerah-daerah yang sudah dikuasai oleh para pemberontak. Kemudian, bentuk “perlindungan” yang diusulkan oleh Perancis adalah diberlakukannya no-fly zone (daerah larangan terbang) dengan diawasi oleh pesawat tempur negara-negara adidaya. Tentu saja Rusia dan China memveto usulan ini karena jika usulan itu diterima, hal itu sama saja mengizinkan militer asing secara langsung terjun ke Suriah.

⁴³ Dina Y. Sulaeman, loc cit, hal. 109.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 113

5 Oktober 2011: dalam pertemuan ke-627, Pemerintah Rusia dan China memveto rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2011/612 yang disponsori oleh Perancis, Inggris, Jerman, dan Portugal.⁴⁵

12 Oktober 2011: terjadi lagi demo pro-Assad di Damaskus, Suriah. Jumlah para demonstran yang sangat masif tersebut berasal dari berbagai kalangan.⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa selain maraknya aksi protes terhadap Assad, ternyata masih ada pula masyarakat yang mendukung rezim.

12 November 2011: Liga Arab menskors keanggotaan Suriah.

16 November 2011: Pemerintah Perancis menarik duta besarnya untuk Suriah. Liga Arab membekukan keanggotaan Suriah. PBB mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi jika Pemerintah Suriah melanggar rencana perdamaian yang disponsori oleh Arab Saudi.

27 November 2011: Liga Arab menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Suriah yang berupa penghentian transaksi dengan Bank Sentral Suriah dan penghentian pendanaan Pemerintah Arab terhadap proyek-proyek di Suriah.

19 Desember 2011: Presiden Bashar Al-Assad menandatangani rencana perdamaian Liga Arab dan menyetujui masuknya tim penantau ke Suriah.

⁴⁵ Amdya Mashfufah Hisyam, *Op.cit.* Hal. 61.

⁴⁶ http://www.huffingtonpost.com/2011/10/12/syria-pro-assaddemonstration_n_1006554.html diakses pada 9 Maret 2016.

2 Januari 2012: Laporan *Al Jazeera* memperlihatkan bahwa Pemerintah Suriah dan oposisi masih melakukan kontak senjata.⁴⁷

24 Januari 2012: kelompok *Jabhat Al Nusra* merilis video yang disebarluaskan melalui YouTube. Dalam video itu, mereka mengutip bahwa "pusat kaum muslimin pada hari kebangkitan adalah di Damaskus". *Jabhat Al Nusra* meyakini bahwa revolusi Suriah adalah kesempatan emas untuk merealisasikan hadis-hadis nabi terkait kebangkitan muslim di Damaskus.⁴⁸

4 Februari 2012: Pemerintah Rusia dan China memveto rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S 2012 77 yang disponsori oleh Perancis dalam pertemuan ke-6711.

6 Februari 2012: Pemerintah AS menarik duta besarnya untuk Suriah.⁴⁹

24 Februari 2012: Perancis dan Amerika Serikat berinisiatif membentuk kelompok *Friend of Suriah* yang diikuti lebih dari 100 negara. Pertemuan pertama kelompok ini dilakukan di Tunisia, pertemuan selanjutnya pada bulan April berlangsung di Istanbul, pertemuan ketiga dilakukan pada bulan Juli di Paris, dan pertemuan keempat dilaksanakan pada bulan Desember 2012 di Marakesh. Pada dasarnya, tujuan dibentuknya kelompok ini adalah untuk menggalang dukungan internasional terhadap

⁴⁷ Amdya Mashfufah Hisyam, *Op.cit.*, Hal. 62.

⁴⁸ Dina Y. Sulaeman, *Op.cit.*, Hal. 115.

⁴⁹ *Ibid.*

kelompok oposisi Suriah. Para undangan termasuk beberapa negara menolak hadir, seperti Rusia, China, Iran, dan Lebanon.⁴⁹

5 Maret 2012: Pemerintah Kanada menarik duta besarnya untuk Suriah.

6 Maret 2012: Pemerintah Rusia, China, AS, dan Inggris bertemu di Maroko untuk membahas rancangan resolusi AS yang mendesak mengakhiri konflik di Suriah.

10 Maret 2012: Kofi Annan, sebagai wakil PBB dan Liga Arab mengunjungi Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar Al-Assad.

21 Maret 2012: Dewan Keamanan PBB menyetujui enam butir rencana perdamaian Kofi Annan untuk mengakhiri kekerasan di Suriah.

27 Maret 2012: Presiden Bashar Al-Assad menyetujui enam butir rencana perdamaian Kofi Annan. Salah satunya adalah penarikan pasukan di wilayah berpenduduk mulai 10 April 2012.

3 April 2012: Pemerintah Suriah menarik pasukannya di beberapa wilayah yang dianggap sudah tenang dan masih menempatkan pasukannya di wilayah yang dianggap masih —panasi.

8 April 2012: Presiden Bashar Al-Assad mengajukan tuntutan jaminan tertulis dari pihak oposisi bahwa mereka akan menepati gencatan senjata.

12 April 2012: Pemberlakuan gencatan senjata pada pukul 06.00 namun pemerintah tidak menarik pasukannya.

⁴⁹Dina Y. Sulaeman, *Op.cit.* Hal. 116-117

19 April 2012: Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, merekomendasikan untuk menambah jumlah peninjau tidak bersenjata untuk memantau misi perdamaian di Suriah. Dua hari kemudian, PBB menyepakati untuk menambah jumlah pengamat misi perdamaian sebanyak 300 orang.⁵¹

21 April 2012: United Nation Supervision Mission in Syria (UNSMIS) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. UNSMIS terdiri dari pengamat militer tanpa senjata serta pengamat sipil yang dianggap kompeten. Lembaga ini memiliki mandat untuk memonitor penghentian kekerasan bersenjata yang dilakukan semua pihak yang bertikai.⁵² Kemudian, pada tanggal 24 April 2012, Kofi Annan dalam briefing di DK PBB menyatakan bahwa sisi penting keberadaan UNSMIS adalah untuk menyediakan 'mata dan telinga di lapangan'.

25 Mei 2012: terjadi Tragedi Houla. Tragedi Houla dikenal juga sebagai tragedi pembantaian yang menimpa masyarakat sipil dan sejak tragedi ini pula, seluruh perhatian masyarakat internasional serentak fokus pada Suriah. Padahal, sebelumnya masyarakat internasional hanya beranggapan bahwa apa yang terjadi di Suriah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya.⁵³

⁵¹ Amdya Mashfufah Hisyam, loc cit, hal. 61-64.

⁵² Dina Y. Sulaeman, loc cit., hal. 37.

⁵³ *Ibid.* hal. 31.

29 Mei 2012: Pemerintah Kanada dan Perancis mengusir Duta Besar Suriah untuk negara mereka sebagai bentuk tekanan untuk Pemerintah Suriah.

16 Juni 2012: Penarikan peninjau tidak bersenjata PBB dari Suriah demi alasan keamanan.

22 Juni 2012: Pasukan Suriah menembak jatuh pesawat pengintai Turki.

2 Juli 2012: Ketua Liga Arab mengundang sebanyak 250 anggota oposisi Suriah di Kairo, Mesir, untuk membahas pembentukan pemerintah transisi.

3 Juli 2012: Presiden Bashar Al-Assad menyatakan menyesal atas penembakan pesawat pengintai Turki dan berharap konflik tidak meluas.

19 Juli 2012: Dalam pertemuan ke-6810, Pemerintah Rusia dan China memeveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/2012/538 yang disponsori oleh Perancis.

23 Juli 2012: Pemerintah Suriah mengancam akan menggunakan senjata kimia jika mendapat serangan dari pihak luar.

1 Agustus 2012: Liga Arab mengajukan resolusi ke Majelis Umum PBB yang menginginkan agar Presiden Bashar Al-Assad turun dan menyerahkan kekuasaan ke pemerintah transisi serta menuntut penghentian serangan terhadap warga sipil.

2 Agustus 2012: Kofi Annan secara resmi mengundurkan diri sebagai wakil Liga Arab dan PBB.

18 Agustus 2012: pengangkatan Fakhdar Brahimti sebagai wakil Liga Arab dan PBB menggantikan Kofi Annan.

4 September 2012: Presiden Bashar Al-Assad mengizinkan Palang Merah Internasional masuk ke Suriah dengan syarat mereka harus tetap netral dan independen.⁵⁴

11 November 2012: Amerika Serikat berusaha melemahkan dominasi Perancis terhadap kelompok oposisi dengan cara mendorong dibentuknya koalisi baru. SNC dianggap gagal mengendalikan jalannya 'revolusi' dan tidak mampu menyatukan berbagai faksi oposisi. Koalisi baru tersebut dibentuk dalam sidang di Doha, Qatar, dan diberi nama Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF).

Dalam konferensi Friends of Syria di Marakesh, Maroko silam, para anggota mendeklarasikan pengakuan mereka terhadap SNCORF sebagai perwakilan resmi rakyat Suriah dan sebagai organisasi yang memayungi semua kelompok oposisi Suriah. Di samping itu, negara-negara anggota Friends of Syria juga menyatakan siap mengucurkan bantuan miliaran dolar untuk membantu kelompok oposisi.⁵⁵

⁵⁴ Amdya Mashfufah Hisyam. *Op.cit.* hal. 64-65.

⁵⁵ Dina Y. Sulaeman. *Op.cit.* hal. 116.

12 November 2012: pihak oposisi memilih Sheikh Muqr Al-Khatib sebagai pemimpin resmi.⁵⁶

20 November 2012: penolakan dari kelompok jihad. Meskipun Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Qatar, dan beberapa negara lainnya telah mengakui SNCORF sebagai wakil yang sah dari rakyat Suriah, namun tidak bagi beberapa kelompok pemberontak di Suriah yang dipimpin oleh kelompok Jabhah Al-Nusrah (JN).⁵⁷

11 Desember 2012: juru bicara Gedung Putih, Victoria Nuland, mengatakan bahwa Jabhah Al-Nusrah adalah alias dari Al Qaeda Irak dan karena itu Amerika Serikat melarang segala bentuk bantuan terhadap kelompok ini. Alasannya, sejak November 2013, JN telah mengaku bertanggung jawab atas 600 serangan, termasuk lebih dari 40 serangan bunuh diri, dan peledakan bom-bom rakitan di kota-kota Damaskus, Aleppo, Hamah, Daraa, Homs, Idlib, dan Dayr Al-Zawr.⁵⁸

Kini pergulitan politik yang terjadi di suriah telah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun serta menimbulkan berbagai macam konflik perang saudara diantara sesama warga Suriah, dan diantara pihak oposisi Suriah dengan pihak militer dan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Bashar Al-Assad. Serangkaian tindakan kekerasan fisik maupun mental juga terjadi di Suriah dalam kurun waktu lima

⁵⁶Amdya Mashfufah Hisyam, *Loc.cit.*

⁵⁷Dina Y. Sulaeman, *Op.cit.* Hal. 117

⁵⁸ Amdya Mashfufah Hisyam, *loc. cit.*, hal. 65-66

tahun belakangan ini, mulai dari pembunuhan, penganiayaan, penculikan, penembakan, pemerkosan, penyiksaan dan lain sebagainya.

Namun di tengah-tengah situasi sosial politik yang terus memburuk di Suriah, Presiden Bashar Al-Assad ternyata masih dapat mempertahankan rezim kekuasaannya karena dukungan dari pihak militer dan aparat birokrasi pemerintah yang masih loyal dan cukup kuat. "Hingga saat ini lebih dari 250.000 orang telah tewas dan lebih dari satu juta telah terluka dalam konflik perang saudara di Suriah yang dimulai sejak Maret 2011. Krisis juga telah menyebabkan setengah (sekitar 12 juta orang) dari penduduk Suriah - 23 juta orang sebelum perang - mengungsi.⁵⁹ Mereka memilih meninggalkan tanah air mereka, sementara warga yang bertahan harus beradaptasi dengan teror, desing peluru, darah, ledakan bom, penculikan, pembunuhan dan kekejian lainnya.

Situasi keamanan Suriah yang semakin memburuk dan telah menyebabkan terjadinya tragedi kemanusiaan itu kemudian disoroti oleh dunia internasional, bahkan oleh Negara-negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suriah seperti Russia, China, dan Iran juga mulai menekan pemerintah Suriah untuk tidak bertindak represif dan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negaranya sendiri.

⁵⁹Sanbas, Akibat Perang, 400 Ribu Penduduk Suriah Kelaparan, 250 Ribu Sudah Tewas, 1 Juta Terluka dan 12 Juta Orang Mengungsi. Dalam <http://www.gorjau.com/internasional/akibat-perang-400-ribu-penduduk-suriyah-kelaparan-250-ribu-sudah-tewas-1-juta-terluka-dan-12-juta-orang-mengungsi.html>. Diakses 8 maret 2016

Kawasan Suriah kemudian menjadi wilayah konflik militer ekstrem seperti Jabhat al-Nusra dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) ikut berperang. Situasi tidak jelas siapa melawan siapa, karena setiap pihak memiliki agenda masing-masing, kecuali Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) yang bekerja sama dengan HNC menumbangkan pemerintahan Assad. didukung dana dari Amerika Serikat.

Kawasan Timur Tengah memang merupakan kawasan yang letaknya strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, kawasan ini juga merupakan pusat perkembangan ajaran agama-agama samawi. Tidak hanya itu, kawasan ini juga terkenal dan menjadi daya tarik bagi investor asing dan negaranegara lain disebabkan kandungan sumber daya alamnya yang menggoda dan yang menjadi motor penggerak industri serta perekonomian internasional dewasa ini.

B. Hubungan China Dan Timur Tengah.

Hampir dua per tiga cadangan minyak dunia yang sudah terbukti terkonsentrasi di teluk Arab, dimana Arab Saudi menguasai lebih dari seperempat cadangan minyak yang terdapat di kawasan timur tengah, Irak dan Kuwait sama-sama menguasai seperempat cadangan minyak timur tengah. Ketiga negara ini menguasai sekitar separuh cadangan minyak dunia yang sudah ditemukan. Produsen besar potensial lainnya yaitu Iran menguasai sepersepuluh cadangan

minyak dunia. Negara-negara terdahulu menguasai hampir 40% pasokan minyak mentah dunia, dimana porsi Arab Saudi sekitar 12% dan Iran 7%.⁶⁰

Hubungan China terhadap ketersediaan minyak dunia (timur tengah) diawali ketika China menjadi Net Importer minyak pada tahun 1993 dan minyak mentah pada tahun 1996. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020 China harus mengimpor sekitar 57-73%⁶¹ dari kebutuhan minyaknya.⁶²

China pertama kali khawatir terhadap pasokan minyaknya pada tahun 1990-an dan arena itu mulai mengambil langkah-langkah untuk menjamin pasokan. Hingga pada tahun 2006 pemusok besar tunggal China adalah Arab Saudi, tetapi Iran juga sangat penting. Sehingga wajar bila china mengupayakan hubungan lebih erat dengan timur tengah.

Selama beberapa tahun terakhir China menerapkan berbagai macam strategi untuk mengamankan pasokan minyak dari kawasan tersebut. China berusaha merundingkan perjanjian pasokan energy jangka panjang, khususnya kemitraan minyak strategis dengan arab Saudi pada tahun 1999. Perusahaan-perusahaan minyak china berusaha mendapatkan hak investasi dan menggarap lading-ladang minyak dikawasan itu dan akhirnya China mengundang perusahaan-perusahaan teluk untuk menanam modal di kilang-kilang penyulingan China guna membangun hubungan yang lebih erat.

⁶⁰Martin Jacques. *When China Rules The World*. Kompas: Jakarta., 2009. Hal. 370

⁶¹*Ibid.* Hal. 371

Jantung strategi china di timur tengah terdapat Iran yang sudah lama punya hubungan dekat dengan China. Kedua negara ini memiliki banyak kesamaan yang mempunyai peradaban yang sangat tua dengan kekayaan sejarah capaian-capaian dan perasaan unggul dari pada negara-negara lain di kawasan masing-masing. Sebagai kekuatan global yang sedang bangkit tentu china mengupayakan hubungan bersahabat dengan negara-negara yang lebih kuat yang pada gilirannya mendongkrak pengaruhnya, dan Iran sangat memenuhi kategori ini.

Hubungan ekonomi China dan Iran mulai berkembang setelah hengkangnya Amerika Serikat dan Inggris menyusul Revolusi tahun 1979. Kunci dari kemitraan hangat mereka adalah ekspor besar-besaran dengan barang modal teknologi tinggi, layanan teknis dan senjata china ke Iran dengan imbalan minyak dan bahan mentah. Perkembangan kedua negara ini sangat pesat diawali pada tahun 1990-an. Pada tahun 2003, dua produsen besar kendaraan bermotor China membangun pabrik di Iran. China merundingkan sebuah paket besar perjanjian minyak china pada tahun 2004 yang membuat China menjadi pemangku kepentingan utama dan salah satu investor asing terbesar dalam industry minyak Iran. disamping Iran menjadi salah satu pemasok minyak terbesarnya. China menandatangani perjanjian penting lain pada tahun 2007 untuk mengembangkan porsi besar lading minyak Yadavaran.⁶²

⁶²Martin Jacques, *Op.cit.* Hal. 375

C. Kebijakan Luar Negeri China Dalam Konflik Suriah.

Cina dalam konflik Suriah telah melakukan veto sebanyak empat kali, dalam hal ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri china dalam konflik yang terjadi di Suriah. Hak Veto yang dikeluarkan oleh china antara lain sebagai berikut; Veto pertama dikeluarkan dalam draf resolusi no. S 2011 612 tanggal 4 Oktober 2011. Draft ini diajukan oleh Prancis, Jerman, Portugal dan Inggris. Rancangan resolusi ini disetujui oleh 9 dari 15 anggota DK PBB. Dua veto diajukan oleh Cina dan Rusia sedangkan empat negara lainnya memilih abstain. Rancangan resolusi ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terjadi di Suriah dan mengecam "kematian secara terus menerus dan pelanggaran HAM sistematis serta penggunaan kekerasan melawan warga sipil oleh pemerintah Suriah". Di dalam draft juga tertulis mendesak "semua pihak untuk menolak kekerasan dan ekstrimisme" dan menyerukan "suatu proses politik inklusif di Suriah yang dilakukan di lingkungan yang bebas dari kekerasan, ketakutan, intimidasi, dan ekstrimisme serta ditujukan secara efektif menangani aspirasi yang sah dan kepentingan penduduk Suriah". Melalui draft tersebut pemerintah Suriah juga dituntut untuk:

1. Segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan bekerja sama sepenuhnya dengan kantor Komisioner Tinggi HAM.
2. Melaksanakan secara penuh HAM dan kebebasan mendasar bagi seluruh penduduk termasuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul

secara damai, membebaskan semua tahanan politik dan demonstran yang ditahan, dan mencaerut perbatasan pada semua bentuk media.

3. Menghentikan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil.
4. meringankan situasi di daerah krisis dengan memungkinkan akses cepat bagi pemantau HAM yang diakui, pekerja dan lembaga kemanusiaan, dan memulihkan layanan dasar termasuk akses ke rumah sakit.
5. memastikan keamanan orang-orang yang telah melarikan diri dari kekerasan untuk kembali ke rumah mereka⁶⁵

Dalam draf juga diserukan kepada semua negara untuk "melatih kewaspadaan dan menahan pasokan langsung dan tidak langsung penjualan senjata ke Suriah dan material yang terkait seperti pelatihan teknis, sumber finansial, saran atau bantuan lain yang berkaitan dengan senjata dan peralatan terkait".⁶⁴ Dari draf tersebut dapat dilihat bahwa dunia internasional melalui DK PBB mendesak pemerintah Suriah untuk segera mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM, dan mengancam untuk mengembargo pasokan senjata menuju Suriah. Duta besar Suriah Bashar Ja'afari mengatakan rancangan resolusi ini mencerminkan upaya bias dari beberapa negara Barat untuk melemahkan otoritas negaranya. Bashar berpendapat bahwa kebutuhan dan aspirasi rakyat Suriah yang sah telah disalahgunakan oleh beberapa kelompok dalam negeri (dengan dukungan dari elemen asing) untuk memprovokasi intervensi eksternal.

⁶⁵ Rizka perdana putra. Kebijakan Luar Negeri China Dalam Konflik Suriah. Skripsi. Universitas Airlangga. Hal. 30

⁶⁴ *Ibid.* Hal. 31

Cina sendiri memveto draft resolusi ini karena menganggap bahwa rancangan tersebut hanya berfokus untuk menekan pemerintah Suriah dan bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi atau ancaman dianggap tidak membantu untuk menyelesaikan masalah di Suriah dan sebaliknya membuat situasi menjadi lebih rumit. Lebih lanjut Cina melalui perwakilannya di PBB Li Baodong mengatakan bahwa Cina menyetujui proses politik secara inklusif namun Cina juga menegaskan bahwa ia sepenuhnya menghormati kedaulatan Suriah. Satu hal yang terus didukung Cina adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan menyelesaikan krisis politik secara dialog.⁶⁵

Veto kedua dikeluarkan Cina pada draft resolusi DK PBB pada tanggal 4 Februari 2012. Draft ini diajukan oleh 20 negara yaitu Maroko, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Portugal, Kolombia, Togo, Libya, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Oman dan Turki. Draft resolusi no. S/2012/77 ini menyatakan keprihatinan atas situasi yang memburuk dan juga kematian ribuan orang. Draft ini juga mengecam pelanggaran berat HAM dan semua kekerasan terlepas dari manapun asalnya. Pemerintah Suriah juga dituntut untuk melaksanakan "tanpa penundaan" unsur-unsur dari rencana yang telah ditetapkan oleh Liga Arab pada tanggal 2 November 2011 dan keputusan tanggal 22 Januari 2012.⁶⁶

Rencana Liga Arab sebagaimana yang diuraikan, dalam teks rancangan resolusi berisi tuntutan terhadap Suriah untuk segera menghentikan semua

⁶⁵Rizka perdana putra, *Op.cit.* Hal. 31

⁶⁶*Ibid* Hal. 33

kekerasan dan melindungi penduduk sipil; membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang; menarik semua pasukan militer dan bersenjata dari kota dan desa; menjamin kebebasan untuk mengadakan demonstrasi secara damai; memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan di Suriah untuk semua anggota Liga Arab yang relevan dan jemaat media Arab dan internasional untuk menentukan kebenaran tentang situasi di lapangan dan memantau insiden yang berlangsung; serta memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan misi observasi Liga Arab.⁶⁷

Dalam draf tersebut juga mendukung penuh keputusan Liga Arab tanggal 22 Januari 2012 untuk memfasilitasi transisi politik Suriah yang mengedepankan demokrasi, sistem politik plural, di mana semua warga negara adalah sama terlepas dari afiliasi etnis atau keyakinan mereka, termasuk melalui dialog politik yang serius antara pemerintah Suriah dan seluruh oposisi Suriah di bawah naungan Liga Arab.⁶⁸

Menyikapi draf tersebut melalui Duta Besarinya Bashar Ja'afari, Suriah mengatakan akan mampu memenuhi rencana Liga Arab jika negara-negara Barat dan lainnya tidak memberikan "miliaran dolar" untuk kelompok-kelompok oposisi bersenjata dan menaungi mereka untuk memfasilitasi serangan terhadap warga sipil Suriah.⁶⁹

⁶⁷Rizka perdana putra. *Op.cit.* Hal. 33

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*

Untuk itu Cina berupaya meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara lain melalui konsep Jalur Sutra Kelana-pala sebagai strategi "Satu sabuk, satu jalan") yang merupakan dasar besar Tiongkok untuk menghubungkan negeri-negeri yang dilintas' rute perdagangan berseluruhnya, mulai dari Asia Tengah hingga Eropa dan Afrika, mulai dari Asia Tenggara hingga Jazirah Arab.⁷⁰

China sendiri secara diplomatis melalui perwakilannya Li Baodong (Wakil Menteri Luar Negeri China) masih tetap menyerukan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan di Suriah. Cina juga mendukung upaya Liga Arab untuk memulihkan stabilitas Suriah serta tetap menjunjung tinggi kedaulatan, kehormatan, dan integritas wilayah Suriah. Namun Li Baodong juga menyatakan bahwa dalam situasi saat ini, menempatkan "penekanan yang tidak semestinya" untuk menekan pemerintah Suriah tidak akan membantu menyelesaikan krisis, tapi akan menambah rumit situasi. Cina mengambil sikap untuk mendukung amandemen teks yang diusulkan oleh Federasi Rusia dan menganggap bahwa tekanan untuk menyetujui rancangan resolusi tidak akan mengatasi permasalahan ketika di dalam DK PBB sendiri masih belum mencapai kesepakatan (Rusia menolak rancangan draf). Li Baodong kemudian menekankan dan menambahkan bahwa hal ini adalah dalam konteks bahwa Cina telah menentang draf proposal.⁷¹

⁷⁰Kolom, "Membaca kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Timur Tengah" dalam <http://news.detik.com/kolom/3142307/membaca-kebijakan-luar-negeri-tiongkok-di-timur-tengah>. Di akses 15 Maret 2016.

⁷¹Rizka perdana putra. *Loc cit*. Hal. 54

Pada tanggal 19 Juli 2012 untuk ketiga kalinya Cina memveto draf resolusi DK PBB. Resolusi ini bertujuan untuk memperpanjang mandat Misi Pengawasan PBB di Suriah (UNSMIS) dan mengancam sanksi terhadap pemerintah Suriah jika tuntutan untuk mengakhiri kekerasan tidak dipenuhi.⁷² Draft resolusi ini sendiri diajukan oleh Prancis, Jerman, Portugal, Britania Raya, dan juga Amerika Serikat. Sebelas suara mendukung draf dan dua negara melawan (Cina dan Rusia) dan 2 negara abstain (Pakistan dan Afrika Selatan). Dalam draf tersebut tugas UNSMIS yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2012 direncanakan akan diperpanjang selama 45 hari. Rancangan tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal untuk mempertahankan kapasitas minimum pengamat militer dan komponen sipil yang diperlukan untuk mempromosikan langkah maju pada Rencana Enam Poin (Annan Six Point Plan) melalui fasilitasi dialog politik dan untuk melakukan tugas verifikasi fakta. Selain itu melalui draf tersebut juga mengecam semua serangan terhadap UNSMIS dan menegaskan kembali bahwa pelaku serangan terhadap personil PBB harus dimintai pertanggungjawaban.

Draf ini juga menuntut pihak berwenang Suriah untuk memastikan operasi United Nation Supervision Mission in Syria atau disingkat dengan UNSMIS berjalan efektif; memfasilitasi penyebaran secara cepat dan tanpa hambatan seluruh personil agar dapat memenuhi mandatnya.⁷³ Lebih lanjut dalam draf tersebut memutuskan bahwa, jika pemerintah Suriah belum sepenuhnya

⁷²Rizka perdana putra. *Op.cit.* Hal. 34

⁷³Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/538 (19 Juli 2012) dalam http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/538. Di akses 14 Agustus 2016

memenuhi hal tersebut dalam waktu sepuluh hari atau akan segera memaksanakan tindakan sesuai yang tertera dalam pasal 4 dari Piagam PBB.⁷⁶

Cina secara resmi melalui Li Baodong menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Suriah dan mengancam keras pembunuhan warga sipil dan serangan bom di Damaskus. UNSMIS dianggap telah memberikan peran penting dan oleh karena itu Cina mendukung usulan Sekretaris Jenderal untuk memperpanjang mandat UNSMIS. Namun, lebih lanjut menurut Li Baodong rancangan resolusi, bagaimanapun, adalah kontraproduktif, karena dianggap tidak seimbang dan menempatkan tekanan hanya pada satu pihak. Hal ini hanya akan menggagalkan penyelesaian konflik melalui jalur penyelesaian politik dan merusak perdamaian dan stabilitas regional.⁷⁷

Krisis menurut Li Baodong harus diselesaikan oleh Suriah sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyat Suriah, serta norma-norma dasar yang mencakup hubungan internasional. Diskusi yang berlangsung dalam draf resolusi ini membahayakan kesatuan Dewan Keamanan, karena negara yang mensponsori mengambil "pendekatan yang kaku dan sombong" dan menolak untuk melakukan revisi.

Veto terakhir dalam kurun waktu dimulainya konflik Suriah sampe akhir 2014 dikeluarkan Cina pada draf resolusi no. S/2014/348. Draft ini diajukan oleh 55 negara termasuk di dalamnya 13 anggota DK PBB. Pemerintah Suriah dan nilisi pro-pemerintah beserta kelompok bersenjata non-negara dikecam telah

⁷⁶ Rizka perdana putra. *Op.cit.* Hal. 35

⁷⁷ *Ibid.* Hal. 36

melakukan pelanggaran HAM dan hak kemanusiaan internasional. Draft ini kemudian ingin mengajukan situasi di Suriah tersebut ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC). Resolusi ini juga disetujui akan memberikan mandat kepada Mahkamah untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan selama konflik di Suriah, yang sejak Maret 2011 menyebabkan korban kematian lebih dari 100.000 warga sipil, serta perpindahan jutaan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁷



⁷ Rizka perdana putra. *Loc cit.* Hal. 37

KEPENTINGAN NASIONAL CHINA DALAM KONFLIK SURIAH

A. Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Suriah

A.1. Kepentingan Ekonomi.

Kepentingan utama Cina di Timur Tengah adalah untuk memenuhi kebutuhan potensial akan energy. Pertumbuhan ekonomi pesat Cina didukung oleh sumber daya energi yang melimpah dan ekspor barang dagangan. Namun pengembangan industri energi dalam negeri Cina sendiri tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan ekonomi. Terhitung sejak tahun 1993 Cina yang sebelumnya memainkan peran sebagai negara eksportir sumber daya alam khususnya minyak berubah menjadi negara importir. Saat itu Cina memulai kebijakan "go out" nya (zhouchuqu) untuk memberi makan pertumbuhan ekonomi.⁷⁷ Saat ini sekitar setengah dari konsumsi sumber daya alam Cina dipenuhi melalui impor. Lebih lanjut, setengah dari minyak mentah yang diimpor berasal dari Timur Tengah menjadikannya sebagai pengeksport tertinggi minyak mentah ke Cina. Untuk itu Cina akan semakin membutuhkan pasokan minyak dari luar negeri khususnya dari kawasan Middle East and North Africa (MENA) atau Timur Tengah dan Afrika Utara belum maksimal dimanfaatkan.

Selain untuk memenuhi kebutuhan energi, kawasan Timur Tengah juga merupakan kawasan logistik strategis dan hubungan perdagangan untuk barang

⁷⁷Cristina Lin. "China's Strategic Shift Toward The Region Of The Four Seas.TheMiddle Kingdom Arrives In The Middle East" *Middle East Review of International Affairs*. 2013 dalam http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISSN_163381/publicationdocument_singledocument/660d7c24-8bed-44a0-b6cf-a6038e03e2_en/226_Lin.pdf di akses 21 Agustus 2016

ekspor Cina serta akses pasar menentu untuk Afrika.⁷⁸ Kini siapa saat ini menjadi mitra dagang terbesar Cina adalah Amerika Serikat. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan besar di benua Afrika – baik melalui proyek-proyek infrastruktur dan juga kontrak pasokan energi jangka panjang. Lebih dari 1 juta orang Cina tinggal di Afrika naik dari sekitar 100.000 pada awal 2000-an, dengan nilai perdagangan sebesar \$ 12, miliar pada tahun 2011.⁷⁹ Pada tahun 2009, Cina melampaui Amerika Serikat untuk menjadi partner perdagangan utama Afrika. Dengan demikian, Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang menghubungkan pasar Eropa, Afrika, dan Asia.

Dengan demikian mengingat lokasi Timur Tengah sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan tiga benua, dimana kawasan ini penting untuk akses pasar dan lokasi cadangan energi melimpah untuk memenuhi bahan bakar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di China. Mengingat Suriah merupakan negara bagian dari kawasan Timur tengah yang sedang di landa konflik, maka kekhawatiran China pun hadir ketika konflik tersebut menyebar luas di kawasan timur tengah akan berpengaruh pada kepentingan ekonomi China sendiri. Maka dari itu pemerintahan China menganggap Timur Tengah sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan luar negerinya.⁸⁰

⁷⁸Cristina Lin. *Op.cit.*

⁷⁹Jacob Zenn, "Chinese, Overseas and Insecure," *Asia Times*, dalam <http://www.worldfinancialreview.com/?p=3177> Diakses 23 Agustus 2016.

⁸⁰Rizka perdana putra. *Op.cit.* Hal. 46

A.2. Keamanan Energi China di Timur Tengah.

Keterlibatan China di pasar energi global telah meningkat secara dramatis dalam satu dekade terakhir, menyumbang sekitar 60 persen dari pertumbuhan permintaan energi global antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2013. Didorong oleh tingkat pertumbuhan PDBs *(Gross Domestic Product)* rata-rata tahunan melebihi 10 persen pada periode yang sama, permintaan minyak Cina meningkat rata-rata 450.000 barel per hari di setiap tahun. Pada 2014 China mengkonsumsi 10,4 juta barel per hari, naik dari 6,4 juta barel per hari pada tahun 2004.⁸¹

Untuk memenuhi kebutuhan sumbueraayanya Cina mencari sumber energi alternatif di berbagai belahan dunia seperti di Asia Tengah. Namun ketergantungan Cina terhadap minyak dari Timur Tengah juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Timur Tengah saat ini merupakan eksportir terbesar minyak mentah ke Cina.

81 Rizka Perdana Putra, *Op.cit* Hal. 47



⁸¹Rizka perdana putra, *Op.cit* Hal. 47

Gambar 3. Impor minyak mentah china tahun 2011.⁸²

Impor Minyak Mentah Cina tahun 2011 terus meningkat dari tahun 1990 sampao 2011. Pada tahun 1990 pangsa impor minyak Cina dari Timur Tengah sebesar 48%, kemudian meningkat menjadi 49% pada tahun 2005, dan 51% pada tahun 2011. Menurut International Energy Agency mengekspektasikan bahwa impor minyak mentah Cina dari Timur Tengah akan mencapai angka 70% pada tahun 2020 dan terus berkembang sampai 2035. Arab Saudi adalah pemasok energi terbesar Cina dengan jumlah ekspor minyak sekitar satu juta barel per hari, menyumbang 20 persen dari total impor minyak mentah Cina. Tidak jauh di belakang adalah Angola, dan di peringkat ketiga terdapat negara penting di Timur Tengah yaitu Iran, yang memberikan kontribusi sekitar 10% dari total impor minyak China secara keseluruhan. Namun, perlu ditunjukkan bahwa sanksi PBB terhadap Iran mengakibatkan ekspor minyak ke Cina turun 74% pada tahun 2009-2010, turun sebesar 16 persen dari impor minyak Cina keseluruhan pada tahun 2009. Sanksi PBB juga mengakibatkan posisi Iran turun dari peringkat kedua pemasok minyak terbesar untuk Cina.⁸³

Dengan ekonomi Cina yang terus tumbuh, impor minyak juga mengalami kenaikan drastis dari \$ 664juta pada tahun 1980 menjadi \$ 235,7miliar pada tahun 2011, menjadikan Cina sebagai importir minyak terbesar dunia. Menurut laporan pada tahun 2013 oleh Wood Mackenzie (sebuah perusahaan konsultan) Cina akan

⁸²Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East More Than Oil. Dalam file:///C:/Users/Nur%20fadly/Downloads/China_and_the_Middle_East_More_Than_Oil.pdf Diakses 3 September 2016.

⁸³ Tom Pember-Finn, "China and the Middle East: The Emerging Energy Nexus" dalam <http://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal111/China4.pdf> Diakses 2 September 2016.

menghabiskan sekitar \$ 50 miliar untuk membeli minyak mentah pada tahun 2020, dari jumlah tersebut pangsa impor Cina dari OPEC (Negara-Negara Penghasil minyak Bumi) juga akan meningkat dari 52 persen pada tahun 2015 menjadi 66 persen pada tahun 2020.⁶⁴

Jumlah impor minyak dan gas Cina dari wilayah MENA terus meningkat, sementara itu Amerika sebagai negara pengimpor terbesar sebelumnya menjadi lebih mandiri karena adanya alternatif eksploitasi minyak dan gas. Negara-negara Uni Eropa juga mengalami penurunan impor minyak mentah dari wilayah MENA. Pada tahun 2005 tercatat impor minyak mentah Uni Eropa dari wilayah ini menyumbang sebesar 21,59 persen dari impor keseluruhan kemudian menurun menjadi 19,47 persen dari total tahun 2011, beralih ke negara pecahan Uni Soviet yang meningkat dari 38,40 persen menjadi 43,33 persen dalam jangka waktu yang sama. Hal ini menjadikan Cina sebagai mitra perdagangan energi yang signifikan bagi Timur Tengah dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk membina hubungan yang lebih erat dengan Baghdad, China menghapuskan sekitar 80 persen dari \$ 8,5 miliar utang Irak ke China pada tahun 2010 dan telah menandatangani transaksi perdagangan bernilai miliaran dolar, termasuk di industri berat, pemerintah, pariwisata dan sektor transportasi. Mengingat pentingnya wilayah Timur Tengah bagi kebutuhan energi nasional, Cina kemudian berusaha untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan semua negara di wilayah ini khususnya dengan Arab Saudi dan Iran. Sejumlah

⁶⁴ Ted.C.Liu, "China's economic engagement in the Middle East and North Africa" dalam: http://fride.org/download/PB_173_China_economic_engagement_in_MENA.pdf

pemimpin Cina termasuk Hu Jintao dan Presiden saat ini Xi Jinping telah mengunjungi Arab Saudi. Cina juga telah menolak sanksi PBB terhadap Iran. Bentuk diplomatik Cina terhadap Timur Tengah ini sesuai dengan kebijakan ekonomi pragmatis Cina dan kepentingan energi di daerah yang kaya komoditas.⁸⁵

A.3. Hubungan Ekonomi China Dan Timur Tengah.

Selain ketergantungan minyak Cina yang terus meningkat, Cina juga terus memperluas hubungan ekonominya dengan Timur Tengah melalui perdagangan. Dari tahun 2005 sampai 2009, menurut statistik resmi China, total volume perdagangan China dengan Timur Tengah naik 87%, dari \$ 100 miliar mencapai sekitar \$ 222 miliar pada tahun 2012.⁸⁶ Angka tersebut mendorong China melampaui Amerika Serikat sebagai tujuan utama ekspor di Timur Tengah pada tahun 2010. Ditinjau dari Cina sendiri menurut Bo Zhiyue, ahli dari National University of Singapore, Timur Tengah akan menjadi mitra dagang keempat atau kelima terbesar Cina.⁸⁷

Ekspor China ke Timur Tengah mayoritas merupakan barang-barang murah rumah tangga. Sebagai contoh adalah tumbuhnya jumlah warga Mesir yang membeli mobil murah buatan Cina. Kemudian, di penduduk di Jalur Gaza dimana terdapat blokade wilayah oleh Israel semakin tergantung pada barang-barang murah dari Cina untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸⁸

⁸⁵Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East" *Op.cit*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Ted.C.Liu. *Op.cit*

⁸⁸Rizka perdana putra. *Op.cit.* Hal. 51

Hal yang sama juga terjadi di Iran. Secara historis hubungan ekonomi Iran dengan Cina dikuasai oleh perdagangan minyak dan gas. Namun, sanksi internasional terhadap Iran telah mengubah hubungan perdagangan Cina-Iran. Barang-barang murah dari Cina telah memenuhi pasar di Iran dan lebih mudah diakses konsumen daripada barang-barang Eropa. Sebelumnya Jerman, Italia dan Yunani adalah mitra dagang utama Iran. Saat ini, Cina adalah tujuan utama bagi ekspor Iran sementara impor Cina ke Iran merupakan nomor dua setelah U.S.A. Menurut Massachusetts Institute of Teknologi (MIT), minyak merupakan komoditas utama ekspor Iran ke Cina sementara impor Iran dan Cina sebagian besar berupa mobil, peralatan industri, dan barang konsumsi. Kerjasama juga terjadi dalam proyek infrastruktur dimana perusahaan China memenangkan kontrak infrastruktur seperti sistem Metro Teheran dan proyek perluasan tol Sadr.⁸⁹

A.4. Kepentingan Keamanan Nasional China.

Gerakan Terorisme telah menggemparkan dunia dan menakuti masyarakat internasional. Koneksi oposisi Suriah untuk teroris adalah salah satu faktor yang memaksa China untuk mengambil kebijakan saat ini di Suriah. China dihadapkan pada serangkaian insiden kekerasan separatis di Xinjiang sejak tahun 2009. Ketika itu kerusuhan terjadi di daerah Ulumuqi, ibu kota wilayah otonomi Xinjiang. Lebih dari 200 penduduk etnis Uighur dan Han tewas. Pemerintah Cina mengklaim Eastern Turkistan Movement (ETT) telah mengorganisir kerusuhan tersebut. ETT telah menjadi target utama dari kegiatan kontra-terorisme China.

⁸⁹Ted.C.Liu, *Op.cit*

terutama setelah hubungan antara gerakan separatis lokal dan al-Qaeda pada tahun sebelumnya.⁹⁰

Pan Guang seorang spesialis China-Timur Tengah dari Akademi Ilmu Sosial Shanghai menyatakan bahwa "pada bulan Juli 2011 ketika terjadi pemboman di Xinjiang, untuk pertama kalinya gerakan separatis Uighur menegakkan bendera Salafi (hitam dengan tulisan Arab) daripada bendera ETI mereka biasanya (biru dengan bintang dan bulan sabit mirip dengan bendera Turki)".⁹¹

Telah tercatat bahwasanya Kelompok militan utama anti-China selain ETI adalah Turkistan Islamic Party (TIP) telah melakukan beberapa serangan di Xinjiang dan diklaim melakukan pemboman mobil bunuh diri di Lapangan Tiananmen Beijing pada Oktober 2013. Kemudian juga melakukan serangan menusuk massa di stasiun kereta api Kunming dan Guangzhou di tahun 2014 dan bom bunuh diri ganda di stasiun kereta api di Urumqi, ibukota Xinjiang. Pada bulan Februari 2014 TIP mengeluarkan video yang berisi "himbauan" untuk pejuang di Suriah.⁹²

Duta besar Suriah untuk Cina menegaskan bahwa ada lebih dari 30 orang Uyghur yang menerima pelatihan militer di Pakistan dan pergi ke Turki untuk bergabung dengan pasukan perang anti-pemerintah. Pemerintah Cina mengklaim bahwa sejak 2012 militan Uyghur dari Xinjiang telah bergabung dengan

⁹⁰ Mu Ren "Interpreting China's (Non-)intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis" Hal. 271

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

pemberontak di Suriah melawan rezim Assad. Salah satu militan kembali ke Xinjiang dan berhasil ditangkap ketika merencanakan untuk melakukan serangan kekerasan di China. Kementerian Luar Negeri Cina menyoroti dugaan hubungan antara militan dari penduduk Cina Turk dan minoritas Muslim dan Al-Qaeda. Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina Hua Chunying mengklaim bahwa anggota dari ETT yang kembali dari Suriah terkait dengan kepentingan inti Cina (yaitu kestabilan Xinjiang). Jika rezim Assad digantikan oleh rezim Islamis, ekstremisme akan cepat menyebar ke republik Muslim di Asia Tengah dan Xinjiang. Dengan demikian, kekhawatiran Cina atas stabilitas di Xinjiang mempengaruhi kebijakan Cina di Suriah.

Pejabat kontra-teror China juga telah menyatakan keprihatinan bahwa kelompok militan Uighur seperti ETIM dan TIP telah merekrut sekitar 25.000 orang ditambah penduduk diaspora Uighur di Istanbul. Pada bulan Oktober 2012, pejabat pemerintah Cina termasuk Mayor Jenderal Jin Yinan dari People Liberation Army's (PLA) National Defense University, pertama mengungkapkan bahwa militan Cina milik organisasi teroris East Turkistan telah bergabung dengan pemberontak anti pemerintah di Syria. Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei memperingatkan bahwa kelompok-kelompok anti-China di Suriah telah "serius membahayakan keamanan nasional China" serta mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Pejabat kontra-teror

⁹³Mu Ren "Interpreting China's (Non-)Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis"

memperkirakan ada sekitar 700 pejuang Cina di ISIS, serta jutaan tambahan dalam faksi pemberontak lainnya seperti Free Syrian Army.⁹⁴

Secara khusus dalam konflik Suriah, adanya hubungan antara pihak oposisi Suriah dengan teroris adalah salah satu faktor yang memaksa Cina untuk mengambil kebijakan saat ini di Suriah. Jaringan teroris global Al Qaeda dan ekstremis Islam lainnya mendukung oposisi dan berpartisipasi dalam konflik melawan pemerintah Suriah. Zenn juga mengamati bahwa "jika pemerintah Suriah berhasil dikalahkan oleh pemberontak (Oposisi), hal ini bisa memberikan lebih banyak kesempatan untuk Uighur dan militan anti-Cina lainnya untuk berlatih dengan kelompok pemberontak yang menang, seperti ISIS, untuk melakukan serangan dari China." Ancaman ini semakin nyata ketika pada Juli 2014 pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi menyerukan jihad dan menyatakan perang terhadap negara-negara yang "merebut hak Muslim" dengan menyebut Cina pertama kali di antara 20 negara. Dalam video tersebut, al-Baghdadi merujuk pada Xinjiang berkali-kali dan meminta Muslim di Cina untuk memohon kesetiaan kepadanya, bahkan mengancam untuk menduduki wilayah Xinjiang yang menjadi bagian dari peta kekhalifahan ISIS.⁹⁵

B. Upaya Memaksimalkan Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Suriah.

Dengan melihat kebutuhan China sebagai negara pengimpor minyak utama dari timur tengah serta kawasan Timur Tengah sebagai akses kawasan logistic

⁹⁴Rizka perdana putra. *Op.cit.* Hal. 64

⁹⁵*Ibid.*

strategis dalam mengeksport barang dan jasa menghubungkan pasar Eropa, Asia dan Afrika. Maka kekhawatiran China dalam konflik Suriah yang terus berjalan akan menghambat hubungan bilateral China dengan negara lain sebagai mitra kerja sama ekonomi. Dengan cara mendukung pemerintahan Bashar al-Assad sebagai pemimpin pemerintahan di Suriah dan proses penyelesaian secara politis, Cina konsisten dengan dasar-dasar luar negeri yang dibentuk olehnya. Melalui prinsip *Five Principles of Peaceful Coexistence* Cina secara tegas untuk menghormati kedaulatan negara lain, dan tidak mencampuri urusan internal negara. Prinsip ini terus dipegang oleh Cina dalam konflik Suriah.

Bentuk keterlibatan china bertujuan untuk kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi serta keamanan sebagai ancaman dari di timur tengah. Adapun upaya untuk memaksimalkan kepentingan Nasional China dalam konflik Suriah antara lain sebagai berikut:

1. Diplomasi.

China dalam Konflik Suriah mengambil sikap resmi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Sikap aktif China untuk menyelesaikan konflik Nampak ketika China mengeluarkan publikasi independen untuk memecahkan krisis di suriah. Sebagai langkah pertama Cina melakukan dan mengeluarkan pernyataan Enam Poin. Langkah ini merupakan langkah pertama Cina untuk bersikap independen dalam konflik Suriah setelah dalam beberapa penyelesaian sebelumnya selalu mengambil sikap yang sejalan

dengan Rusia.⁹⁶ Melalui enam poin tersebut Cina menghimbau kepada pemerintah Suriah dan semua pihak yang terkait untuk:

1. menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil;
2. menekan pemerintah suriiah berbagai faksi di Suriah segera melakukan dialog politik inklusif tanpa syarat melalui mediasi Gabungan Utusan Khusus PBB dan Liga Arab;
3. mendukung upaya bantuan kemanusiaan dengan syarat tetap menghormati kedaulatan Suriah;
4. mengharuskan pihak yang relevan dan masyarakat internasional untuk sungguh-sungguh menghormati kedaulatan Suriah dan hak rakyat Suriah untuk memilih sistem politik, tidak menyetujui campur tangan bersenjata atau mendorong perubahan rezim di Suriah;
5. menyambut baik penunjukan Utusan Khusus Bersama untuk krisis Suriah oleh PBB dan Liga Arab;
6. serta menghimbau anggota Dewan Keamanan secara ketat mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Setelah publikasi pernyataan enam poin tersebut Cina kembali mengeluarkan sikap resmi. Cina mengkonversi pernyataan enam poin tersebut ke dalam sebuah inisiatif resmi: rencana empat poin (Four Point Plan) untuk menyelesaikan krisis empat poin tersebut yaitu:

⁹⁶Rizka perdana putra, *Op.cit.* Hal. 41

1. Pihak yang terlibat dalam konflik dipanggil untuk bersama-sama menghentikan kekerasan.
2. Mereka harus menyesuaikan diri untuk proses transisi politik di Suriah, sementara Rezim Assad akan tetap di tempat untuk memastikan stabilitas politik sampai pembicaraan selesai.
3. Masyarakat internasional akan bekerjasama dengan perwakilan khusus bersama PBB-Liga Arab untuk Suriah (UN-Arab League Joint Special Representative for Syria) untuk melaksanakan resolusi internasional yang telah ditetapkan dibawah naungan PBB dan Dewan Keamanan.
4. Masyarakat internasional akan dilibatkan untuk memperkuat upaya memecahkan masalah kemanusiaan yang disebabkan oleh krisis. bantuan kemanusiaan akan diberikan tanpa politisasi atau militerisasi.

2. Konsiliasi.

China membuka peluang bagi pihak oposisi untuk melakukan pembicaraan terkait penyelesaian konflik di Suriah, seperti kunjungan delegasi dari Syrian National Committee For Democratic Change melakukan kunjungan empat hari ke china, begitu juga dengan pertemuan yang dilakukan Oleh Ahmad Jarba sebagai Presiden Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan pasukan Oposisi yang menemui Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Wakilnya Zhang Ming, pembicaraan tersebut berfokus pada upaya untuk mencapai penyelesaian politik untuk konflik suriah. Parah ahli

peneliti di China juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan delegasi Jarba ini.

Menerima delegasi dari Komisi Nasional merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh China untuk bekerja pada semua pihak yang terkait dengan cara yang positif dan seimbang dalam penyelesaian politik konflik Suriah. Pemerintah Suriah dan pihak Oposisi harus mengambil langkah maju yang penting menuju penyelesaian konflik kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying dalam konferensi pers resmi.⁹⁷ Sehingga China membuka peluang bagi pihak oposisi untuk melakukan pembicaraan terkait penyelesaian konflik Suriah dengan cara berdamai.

kekhawatiran China pun hadir ketika konflik tersebut menyebar luas di kawasan timur tengah pada umumnya sebagai akses perdagangan untuk kawasan Eropa dan Afrika, dan Iran pada khususnya sebagai Negara pemasok sumber energy, akan berdampak pada kepentingan ekonomi china itu sendiri.

⁹⁷Rizka Perdana Putra, *Op.cit.* Hal. 40

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggambarkan tentang kepentingan Nasional China dalam konflik Suriah dan bagaimana upaya untuk memaksimalkan kepentingan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya konflik di Suriah telah masuk pada konsep Neorealisme (Anarchi dalam Hubungan Internasional) itu sendiri, bahwasanya tidak ada lagi pemimpin, dalam hal ini tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang di perintah. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan bagian dari kepentingan nasional oleh pihak-pihak yang terkait, seperti halnya China. Adapun bentuk kepentingan Nasional China dalam konflik Suriah yaitu:

1. Cina berusaha menjaga kerjasama ekonomi dan kebutuhan potensial energinya dengan negara kawasan MENA (Afrika dan Timur Tengah)
2. China memandang penting bahwasanya kawasan timur tengah merupakan akses perdagangan ekspor barang ke wilayah Eropa dan Afrika.
3. Kepentingan lain China di Suriah yaitu memastikan agar gerakan separatism, esktrimisme dan terorisme tidak menyebar ke wilayah China.
4. Cara China untuk memaksimalkan agar kepentingan ekonomi dan energy yang ada di timur tengah mencapai keuntungan yang pesat dari

hasil kerja sama di timur tengah seperti tahun-tahun sebelumnya tanpa konflik.

5. China berusaha untuk mempertahankan stabilitas kawasan di Timur Tengah.
6. Adapun cara untuk memaksimalkan kepentingan Nasional China dalam konflik Suriah yaitu dengan cara mendukung pemerintahan Bahsar Al-Assad sebagai bentuk kerja sama antara negara china dan Suriah dan menantang pihak Oposisi yang menurut China mengancam keamanan diwilayah Xinjiang.
7. Upaya memaksimalkan kepentingan China dalam konflik Suriah yaitu dengan cara Diplomasi dimana China mengambil sikap resmi untuk menyelesaikan konflik secara damai.dan Konsiliasi dimana China membuka peluang bagi pihak oposisi untuk melakukan pembicaraan terkait penyelesaian konflik di Suriah.

B. SARAN.

Kesimpulan diatas merupakan dasar bagi penulis untuk perlunya menyampaikan saran atas kepentingan nasional China dalam konflik suriah antara lain:

1. Semua pihak yang terkait dalam konflik suriah kiranya dapat berdialog bersama dalam pengambilan kebijakan. Karena dengan adanya kepentingan-kepentingan tersebut maka hanya bertambah korban jiwa dalam konflik yang terjadi dan perumusan perdamaian tidak akan pernah tercapai ketika semua pihak mempunyai kepentingan masing-

masing dalam konflik suriah sehingga masyarakat suriah dapat menghirup udara bebas dalam melaksanakan aktifitas kehidupannya.

2. Pihak oposisi kiranya dapat berdamai dengan pihak pemerintahan agar tidak lagi bertambah korban dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Suriah.
3. Penyelesaian konflik di suriah dengan cara politik merupakan cara yang efektif dalam konflik suriah.



DAFTAR PUSTAKA

u :

- aymika Dhwani. 2012. "Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah dalam Konflik Suriah".
- jarjo, Miriam. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- hill, Scoot, dan Linklater, Andrew. 2015. *Teori-teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- yo N. Agus. 2011 "Tokoh-Tokoh Timur Tengah yang Diam-Diam Jadi Antek Amerika dan Sekutunya" Jogjakarta: Diva Press.
- rrir, A.M. 2011 "Gerakan rakyat untuk perubahan." Jakarta: Kementerian luar negeri. Hal 1.
- han Fachri 2006. "Analisis pengaruh reactor nuklir Iran terhadap Politik luar negeri Amerika Serikat. Hal. 16
- am Amdya Mashfufah. 2013. "Analisis Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah" Makassar: Universitas Hassanudin.
- ki K.J. 1992. "Politik Internasional: suatu kerangka analisis" Bandung: Bina Cipta.
- t, Yanuar. 2014. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- es, Martin. 2009. *China Rules The World*. Jakarta: Kompas.
- du, Aleksius. 2008. *Politik Global Dalam Teori dan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- ped, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mu. 2014 "Interpreting China's (Non-)Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis"
- ta, Anak Agung Banyu dan yani, Yanyan Mochamad. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Perdana Riska. 2015. Kebijakan Politik Luar Negeri China Dalam Konflik Suriah. Universitas Airlangga.

Atia, Raisa. 2015. Konflik Suriah Pada Saat Awal Spring 2016. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

man Y. Dina. 2013. Praha Suriah: Niembongkar Persekongkolan Multinasional. Depok: Pustaka Iman.

Kuncahyono. 2013. *Musim Semi Sunah: Anar-istik Sekolah Penyuluh Revolusi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

to, Tulus. 1998. *Teori-teori Politik Luar Negeri*. Yogyakarta: Bigrat Publishing.

N. Kenneth. 1979 "theory of internasional politics" Philippines: addision-wesley publishing Company.

ter:

(Banyak Orang). 2015 "Inilah Aktor Utama Perang Suriah". dalam www.dw.com/id/inilah-aktor-utama-perang-suriah/g-18884183. diakses 7 Februari 2016.

na. Lin. 2013. "China's Strategic Shift Toward The Region Of The Four Seas: The Middle East Arrives In The Middle East" *Middle East Review of International Affairs*. dalam mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISSN/16338/1publicationdocument_singledocument/c24-8bed-44a0-b6cf-a6038ece03e2/en/226_Lin.pdf di akses 21 Agustus 2016

ng. Zhang. 2013. "BRICS: Mitra atau Saingan?". dalam <http://www.dw.com/id/brics-atau-saingan/a-16693473>. diakses 7 Februari 2016.

Resolusi DK PBB no. S/2012/538 (19 Juli 2012) dalam www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/538. Di akses 14 Agustus 2016

rodjo C. Suryo "Serba salah tentang Suriah" dalam http://www.kompasiana.com/serba-sentang-suriah_551271baca333116459ba7d63. Diakses 29 Februari 2016.

isyah. "Pengamat: Rusia-Cina Punya Kepentingan di Suriah" dalam www.republika.co.id/berita/internasional/global/12-03/21/m18kiv-pengamat-ia-punya-kepentingan-di-suriah. Diakses pada 15 maret 2016.

dan Chen, "China and the Middle East dalam [:/Users/Nur%20fadly/Downloads/China_and_the_Middle_East_More_Than_Oil.pdf](http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12-03/21/m18kiv-pengamat-ia-punya-kepentingan-di-suriah) 3 September 2016.

“Membaca kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Timur Tengah” dalam news.detik.com/kolom/3142307/membaca-kebijakan-luar-negeri-tiongkok-di-timur-tengah. Di akses 15 Maret 2016.

liputan6, 2012, “China dan Rusia Beri Dukungan untuk Suriah” dalam news.liputan6.com/cina-dan-rusia-beri-dukungan-untuk-suriah, diakses 7 Februari 2016.

liputan6, 2012, “Resolusi PBB Akan Picu Perang Sipil Suriah”, dalam news.liputan6.com/read/374997/resolusi-pbb-akan-picu-perang-sipil-suriah, diakses 17 Januari 2015.

liputan6, 2012, “Rusia Tolak Resolusi DK PBB” dalam <http://news.liputan6.com/rusia-tolak-resolusi-dk-pbb>, diakses 17 Januari 2016.

Ted, “China’s economic engagement in the Middle East and North Africa” dalam [ide.org/download/PB_173_China_economic_engagement_in_MENA.pdf](http://www.csis.org/ide.org/download/PB_173_China_economic_engagement_in_MENA.pdf)

na, Victor, 2015, “Lewat SCO dan BRICS, Hubungan Rusia-China Semakin Mesra”, <http://international.sindoneews.com/read/1021658/41/lewat-sco-dan-brics-hubungan-rusia-china-semakin-mesra-1436352370>, diakses 7 Februari 2016.

min, 2015, “Surat Kabar China: AS dan Rusia Perang Dingin di Suriah” dalam international.sindoneews.com/read/surat-kabar-china-as-dan-rusia-perang-dingin-di-suriah-1436352370. 7 Februari 2016.

, Akibat Perang, Dalam <http://www.goriau.com/internasional/akibat-perang-400-ribu-orang-teluk-suriah-kelaparan-250-ribu-sudah-tewas-1-juta-terluka-dan-12-juta-orang-lainnya.html>. Diakses 8 maret 2016.

in, 2013, “DK PBB Setujui Pernyataan Bagi Suriah” dalam <http://www.dw.com/id/dk-pbb-setujui-pernyataan-bagi-suriah/a-15824188>, diakses 17 Januari 2015.

“Membaca kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Timur Tengah” dalam news.detik.com/kolom/3142307/membaca-kebijakan-luar-negeri-tiongkok-di-timur-tengah. Di akses 15 Maret 2016.

ember-Finn, “China and the Middle East: The Emerging Energy Nexus” dalam web.stanford.edu/group/sjeaa/journal111/China4.pdf Diakses 2 September 2016.

Jacob. “Chinese, Overseas and Insecure,” *Asia Times*, dalam www.worldfinancialreview.com/?p=3177 Diakses 21 Agustus 2016.

